

*Penilaian Kinerja Satu Tahun Pertama Pemerintahan*

**MENAKAR PERJALANAN DEMOKRASI**

**PRABOWO-GIBRAN**



# Daftar Isi



Latar Belakang	1
Penakaran Pendekatan	5
Rapor Umum Perjalanan – Tingkat Kepuasan Publik yang Rentan	8
Menakar Tempuhan: Analisis Perjalanan Demokrasi dalam Tiga Bidang Kunci	13
① <i>Reformasi Kepolisian</i>	15
② <i>Penanganan konflik di Papua</i>	26
③ <i>Reformasi Sektor Hukum</i>	36
Menatap Tahun Kedua – Saatnya Beranjak dari Bayang- Bayang Jokowi	48
Catatan	51

# Menakar Perjalanan Demokrasi dalam Setahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

*“Sebuah tempuhan padat-tersepat”[1]*

## A. Latar Belakang

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Sebagai kandidat yang terpilih dengan menjanjikan *platform* keberlanjutan, mereka mewarisi dan berjanji akan melanjutkan program-program yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Narasi keberlanjutan itu secara resmi dituangkan ke dalam dokumen **Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran 2024: Bersama Indonesia Maju**, yang menyebut secara eksplisit bahwa fondasi sosial, ekonomi, dan politik yang mereka bangun berangkat dari warisan Jokowi.

*“Prabowo dan Gibran mengajak Putra Putri Terbaik Bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tujuan yang jelas, yaitu Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.”[2]*

[1] Berikut adalah istilah-istilah *lalu lintas* untuk menunjukkan laju kendaraan yang wajib diketahui: (i) macet = tidak bergerak sama sekali atau kecepatan di bawah 5 km/jam; (ii) padat tersepat = 5-10 km/jam. (iii) padat merayap = 10-30 km/jam; (iv) ramai padat = 30-50 km/jam; (v) ramai lancar = 50-80 km/jam; dan (vi) lengang = lebih dari 80 km/jam  
[2] *Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran 2024: Bersama Indonesia Maju*, 2024.



Dalam konteks keberlanjutan tersebut, peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momen penting untuk membaca arah perjalanan demokrasi dalam bangunan kekuasaan yang tengah disusun. Penakaran ini relevan karena penguatan demokrasi adalah bagian integral dari **Program Kerja Asta Cita**, delapan agenda besar yang disebut sebagai arah pembangunan nasional dalam masa pemerintahan Prabowo–Gibran, seperti halnya yang tertuang dalam:

- **Asta Cita 1:** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- **Asta Cita 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- **Asta Cita 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
- **Asta Cita 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur



Keberlangsungan penguatan demokrasi menjadi penting bagi pemerintahan Prabowo–Gibran karena besarnya dukungan warga pada sistem demokrasi itu sendiri. Meski demokrasi Indonesia masih jauh dari sempurna, kepercayaan publik terhadap sistem ini belum pudar. Riset Diego Fossati dan Ferran Martínez i Coma pada 2020 menunjukkan, 86 persen warga Indonesia tetap menganggap demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik, meskipun sadar dengan berbagai kelemahannya.[3] Pola ini serupa tampak dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada Februari 2024. Survei ini memperlihatkan, sebagian besar masyarakat masih puas terhadap cara demokrasi berjalan, walaupun tingkat kepuasan mereka menurun dibanding dua tahun sebelumnya.[4]

[3] Diego Fossati dan Ferran Martínez i Coma, "How popular conceptions of democracy shape democratic support in Indonesia," *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*, disunting oleh Thomas Power and Eve Warburton, (Singapura: ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2020): hlm. 183-185.

[4] Erlina F. Santika, "Survei LSI: Kepuasan Masyarakat terhadap Demokrasi Menurun," *Katadata*, 19 Februari 2024, <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/02/19/survei-lsi-kepuasan-masyarakat-terhadap-demokrasi-menurun>



Image: Kementerian Pertahanan

Arah perjalanan dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran akan membantu kita memindai seberapa jauh Presiden Prabowo mampu mewujudkan visinya tentang demokrasi di Indonesia. Dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo menegaskan visinya tentang “*demokrasi yang santun*”. Ia menyerukan bentuk demokrasi yang damai dan sejuk, di mana perbedaan pendapat tidak perlu berujung pada konflik.

*“Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia, demokrasi yang cocok untuk bangsa kita, demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut-menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan.”[5]*

*Asta Cita*, dengan demikian, merupakan kompas awal untuk menilai arah dan konsistensi pemerintahan Prabowo-Gibran. Janji memperkokoh demokrasi dan HAM menjadi relevan bukan hanya karena tercantum dalam dokumen resmi, tetapi karena ia menuntut pembuktian di tengah sistem politik yang condong berebut kuasa daripada memenuhi aspirasi warga. Satu tahun memang belum cukup untuk menilai seluruh capaian, tetapi cukup untuk melihat kecenderungan. Apalagi, pemerintahan ini tidak dimulai dari ruang kosong. Ia mewarisi negara dengan demokrasi yang rapuh dan akuntabilitas publik yang terkikis sejak akhir rezim Jokowi—sebuah warisan di mana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ditempatkan di atas prinsip kebebasan sipil, HAM, dan tanggung jawab kekuasaan.

[5] Aryo Putranto Saptohutomo, “Isi Lengkap Pidato Perdana Presiden Prabowo Subianto Usai Pelantikan,” *Kompas.com*, 20 Oktober 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/20/13344741/isi-lengkap-pidato-perdana-presiden-prabowo-subianto-usai-pelantikan?page=2>

Selama satu dekade terakhir, Jokowi menempatkan pembangunan ekonomi di atas kebebasan sipil dan supremasi hukum. Reformasi hukum yang semestinya memperkuat keadilan justru diarahkan untuk memperluas kuasa eksekutif: revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 menjinakkan lembaga antirasuah itu dengan menempatkannya di bawah kendali presiden, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2022 memperluas kriminalisasi terhadap kritik publik dan pembela HAM.[6] Tidak berhenti di situ, Sydney Jones menuliskan, Jokowi menjadikan kepolisian Indonesia sebagai “*personal political tool*” yang dipakai untuk melayani kepentingan rezim.[7] Sementara di Papua, pendekatan pembangunan yang diklaim inklusif berjalan beriringan dengan kekerasan aparat dan pembatasan informasi, menciptakan situasi di mana proyek-proyek ekonomi digunakan untuk meredam kritik dan menyingkirkan ruang bagi aspirasi politik warga Papua.[8] Dalam konteks inilah Prabowo memulai pemerintahannya—mewarisi demokrasi yang, seperti digambarkan Sana Jaffrey dan Eve Warburton, “*a democracy at dusk, one that is less accountable and less competitive than at any other time since the country’s political transition.*”[9]

Tahun pertama, mau tak mau, kemudian menjadi titik uji paling awal tentang seberapa jauh demokrasi telah beranjak: apakah *Asta Cita* benar-benar menjadi kerangka kerja untuk memulihkan kepercayaan publik, memperkuat institusi hukum, dan membuka ruang kebebasan sipil—atau sekadar menjadi pembungkus baru bagi kesinambungan kekuasaan lama yang menyingkirkan partisipasi rakyat atas nama stabilitas dan pembangunan.

[6] Thomas Power dan Eve Warburton, “The decline of Indonesian democracy,” *Democracy in Indonesia*, 2020. Sana Jaffrey dan Eve Warburton, “Jokowi’s decade in Power,” *The Jokowi’s Presidency: Indonesia’s Decade of Authoritarian Revival*, disunting oleh Sana Jaffrey dan Eve Warburton, (Singapura: ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2025).

[7] Sidney Jones, “The Politicization of Security under Jokowi”, *Indonesia Update 2024* (Canberra: ANU Indonesia Project, September 13–14 2024), slide 1, diakses pada 21 Oktober 2025, [https://static1.squarespace.com/static/6073e7bd03c5b9274751137e/t/66ea42de86bc963f411a060e/1726628577465/19\\_Sidney+Jones\\_CAP+Jones-Wide.pdf](https://static1.squarespace.com/static/6073e7bd03c5b9274751137e/t/66ea42de86bc963f411a060e/1726628577465/19_Sidney+Jones_CAP+Jones-Wide.pdf)

[8] Sana Jaffrey dan Eve Warburton, “Jokowi’s decade in Power,” 2025.

[9] Sana Jaffrey dan Eve Warburton, “Prabowo’s Indonesia: Inheriting Democracy at Dusk,” *Carnegie Endowment for International Peace*, 22 October 2024, <https://carnegieendowment.org/research/2024/10/prabowos-indonesia-inheriting-democracy-at-dusk?lang=en>

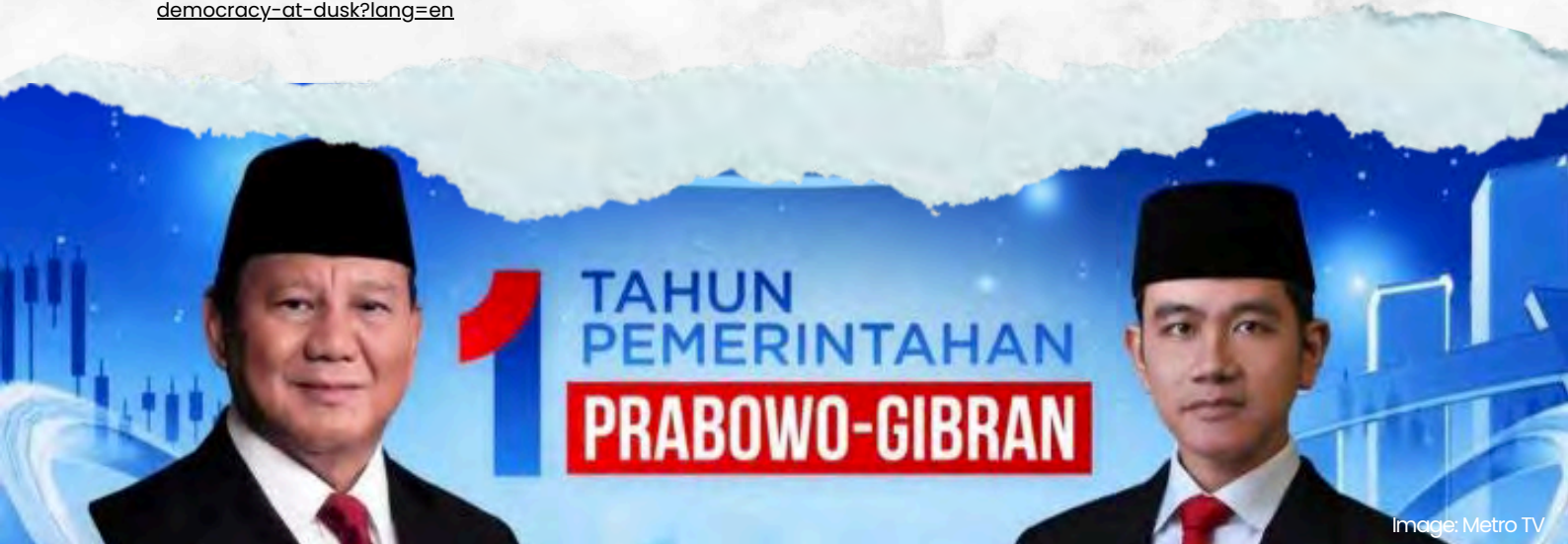




Image: Antara

## ***B. Penakaran Pendekatan***

Menakar capaian kebijakan, apalagi di bidang seluas demokrasi, bukan perkara sederhana. Setiap kebijakan tak hanya lahir dari niat politik, tetapi juga dari tarik-menarik kepentingan, dinamika kelembagaan, dan kondisi sosial yang berubah cepat. Dalam situasi seperti itu, mengukur kemajuan secara objektif menjadi tantangan: data yang tersedia kerap terbatas, hasil kebijakan sering kali tak langsung terlihat, dan perbedaan tafsir tentang apa yang disebut “kemajuan” tidak bisa dihindari. Karena itu, upaya penilaian terhadap perjalanan demokrasi di tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran mesti dilakukan dengan kesadaran atas kompleksitas tersebut, dengan membaca arah dan konsistensi, bukan sekadar menghitung jumlah kebijakan atau capaian formal.

Dokumen ini tidak berpretensi untuk menakar perjalanan dari semua jaban program kerja terkait demokrasi dalam *Asta Cita*. Satu tahun pemerintahan bagi kami masih terlalu pendek untuk bisa memenuhi semua rincian. Sebagai pendekatan, kami akan memilih beberapa isu kunci yang menjadi persilangan serta irisan berbagai program kerja dalam kelompok *Asta Cita* yang berbeda sehingga bisa memberikan gambaran umum atas perjalanan demokrasi dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran. Isu-isu kunci tersebut adalah sebagai berikut:

### Penanganan Konflik di Papua

- Memperkuat kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di daerah perbatasan dan pulau terluar. **(AC 2)**

- Menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum. **(AC 1)**
- Melindungi HAM seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku. **(AC 1)**
- Menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya. **(AC 1)**

- Menjamin dan menegakkan proses penanganan masalah hukum secara profesional, transparan, dan berintegritas serta mencegah hukum dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. **(AC 7)**
- Melindungi hak asasi manusia (HAM) seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku. **(AC 1)**

### PENANGANAN KONFLIK DI PAPUA

### DEMOKRASI SUBSTANTIF

### REFORMASI SEKTOR HUKUM

### REFORMASI KEPOLISIAN

### Reformasi Sektor Hukum

- Memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. **(AC 8)**
- Memprioritaskan pembuatan undang-undang yang terkait dengan perlindungan Perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukum. **(AC 7)**
- Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi. **(AC 7)**
- Menjamin untuk tidak mengintervensi KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi. **(AC 7)**

### Reformasi Kepolisian

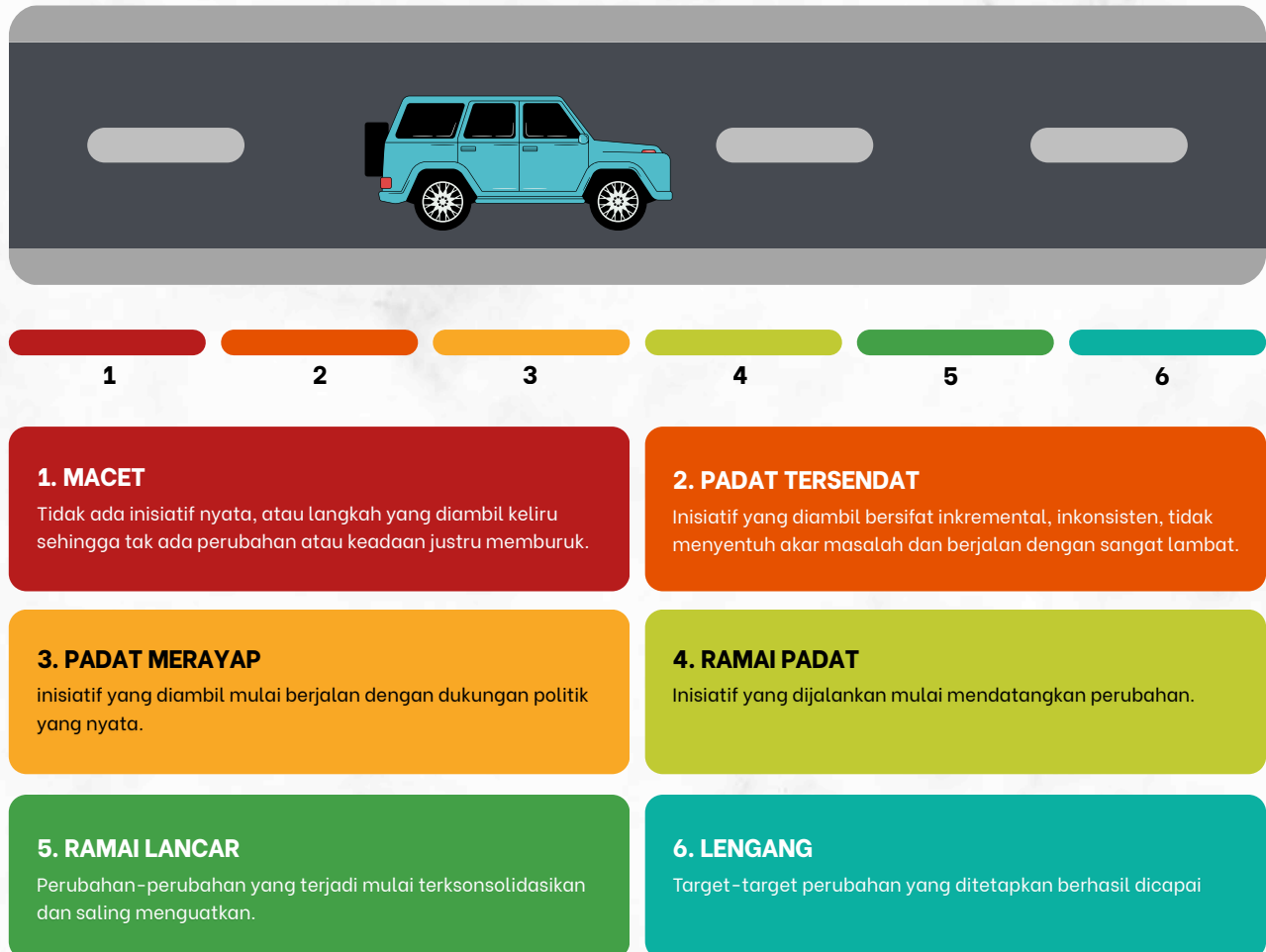
- Mencegah aksi terorisme dan radikalisme dengan reformasi sektor keamanan, pembenahan regulasi keamanan, reorientasi pendidikan aparat penegak hukum, dan melakukan kampanye sosial-kultural secara menyeluruh. **(AC 2 dan 8)**

### KETERANGAN

- Asta Cita (AC) 1: Demokrasi dan HAM
- Asta Cita (AC) 2: Keamanan dan Pertahanan
- Asta Cita (AC) 7: Reformasi Hukum, Politik, dan Antikorupsi
- Asta Cita (AC) 8: Kehidupan Harmonis dan Setara

- Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. **(AC 7)**
- Menjamin dan menegakkan proses penanganan masalah hukum secara profesional, transparan, dan berintegritas serta mencegah hukum dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. **(AC 7)**
- Menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil, dan transparan, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan. **(AC 7)**
- Menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum. **(AC 1)**
- Melindungi HAM seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku. **(AC 1)**

Sebagai unit takar, kami akan menggunakan parabel perjalanan. Alih-alih menggunakan skor kuantitatif yang cenderung mengabaikan dimensi proses serta faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi laju pencapaian, kami akan meminjam serta memodifikasi istilah-istilah lalu lintas untuk menunjukkan laju kendaraan dalam suatu rentang perjalanan, yaitu:



Penilaian dalam dokumen ini disusun berdasarkan analisis terhadap informasi yang tersedia secara terbuka di ruang publik, hasil telaah kolektif internal Kurawal, serta masukan dari sejumlah analis dan pengamat yang relevan dengan isu yang dinilai. Upaya ini berangkat dari semangat untuk menjaga objektivitas, tanpa mengklaim satu-satunya kebenaran. Spektrum penakaran yang digunakan, dengan metafora perjalanan, memberi ruang bagi pembacaan yang lebih reflektif dan terbuka terhadap perdebatan: tentang seberapa jauh langkah telah ditempuh, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan arah mana yang mestinya diambil, tanpa terjebak dalam ilusi kepastian angka atau skor kuantitatif.

### C. Rapor Umum Perjalanan – Tingkat Kepuasan Publik yang Rentan

Sebelum masuk ke penakaran khusus tentang demokrasi, ada baiknya untuk menengok persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan. Cara yang paling populer, meskipun acap terkesan banal, adalah melihat tinggi–rendah dan kecenderungan tingkat kepuasan publik melalui survei opini yang dikerjakan secara ajeg oleh berbagai lembaga. Hasil survei ini menangkap informasi seberapa jauh publik mendukung kebijakan atau tindakan tokoh politik tertentu yang merepresentasikan pemerintah dalam bentuk tingkat persetujuan responden jajak pendapat.[10] Tentu saja, tingkat kepuasan ini bersifat fluktuatif, sangat peka terhadap dinamika politik dan cenderung subjektif.[11] Oleh karena itu, kami tidak hanya akan terpaku pada hasil survei terbaru, tapi juga akan menelisik fluktuasinya dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran untuk mendapatkan gambaran perjalanan yang lebih menyeluruh serta konteks yang lebih utuh atas penilaian perjalanan demokrasi yang tengah dijalani.

Grafik 1 menunjukkan gambar cepat (*snap shot*) fluktuasi tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran sejak menjelang pelantikannya satu tahun lalu. Jajak pendapat yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 10–15 Oktober 2024 menunjukkan bahwa tingkat keyakinan dan ekspektasi publik terhadap pemerintahan yang baru mencapai 85,3%.[12] Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat sangat yakin atau cukup yakin bahwa Presiden Prabowo mampu menjadi pemimpin Indonesia yang lebih baik.

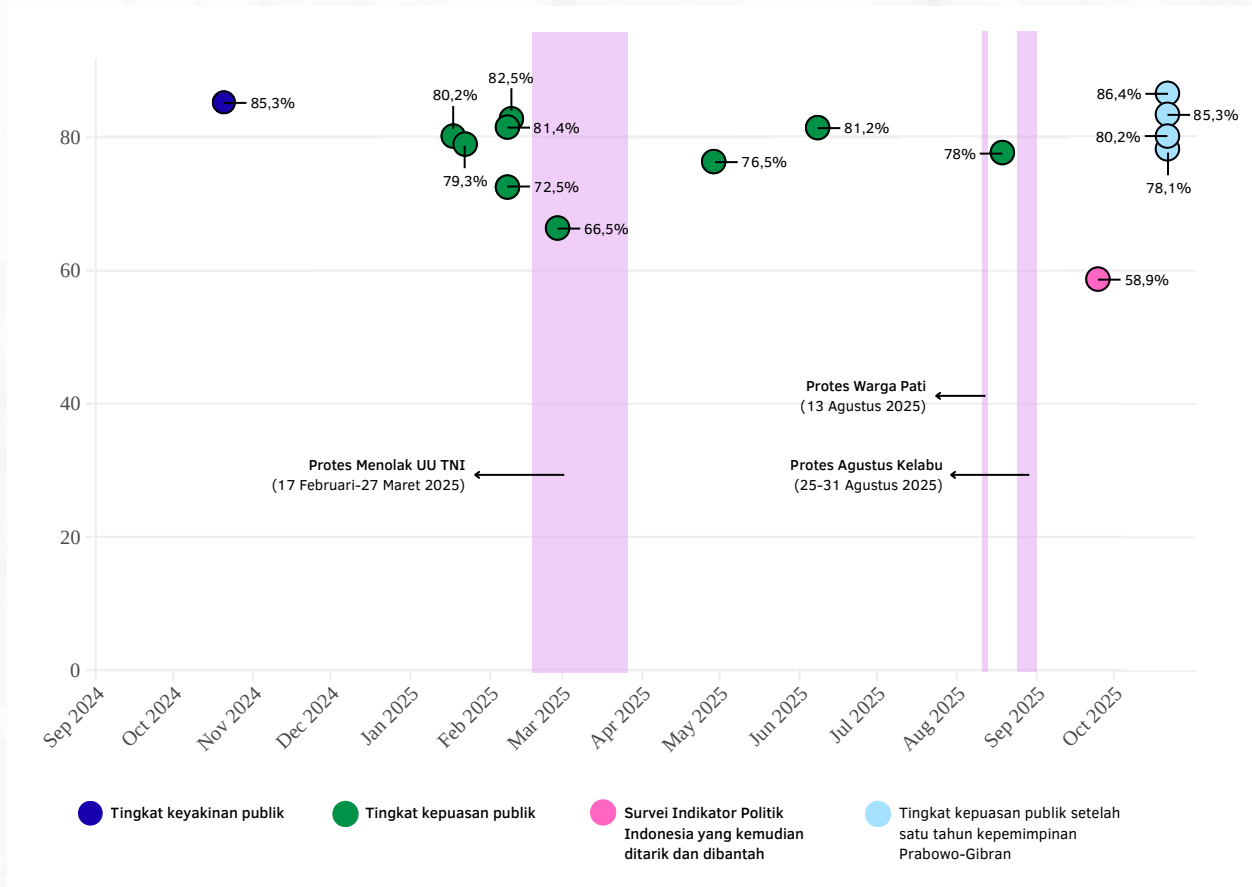
[10] Fiveable, "Approval Ratings – AP US Government," *Fiveable*, 2024. Diakses pada 21 Oktober 2025, <https://fiveable.me/key-terms/ap-gov/approval-ratings>.

[11] Fiveable, 2024.

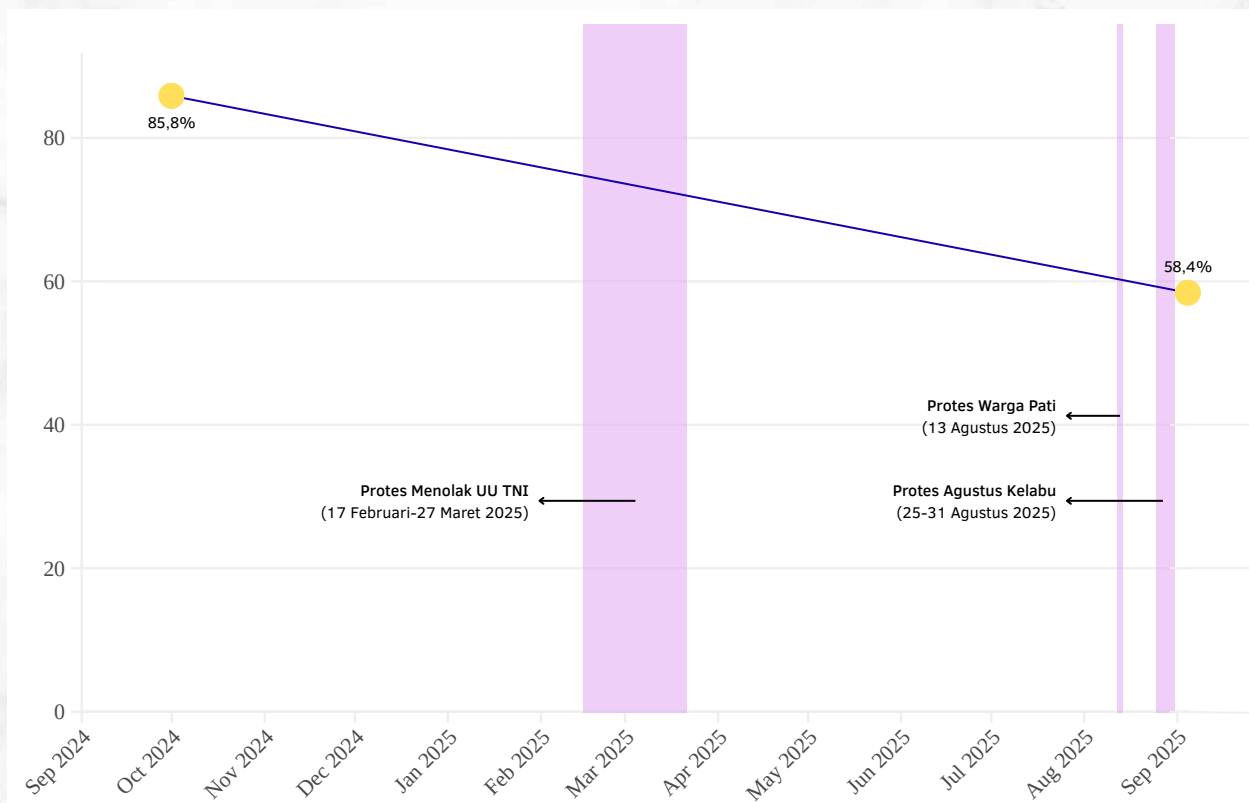
[12] Fathjyah Wardah, "Survei Indikator Politik Indonesia: 85,3% Yakin Prabowo Mampu Memimpin Indonesia," *VOA Indonesia*, 29 Oktober 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/survei-indikator-politik-indonesia-85-3-yakin-prabowo-mampu-memimpin-indonesia/7842381.html>



**Grafik 1. Tingkat Kepercayaan dan Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran (Oktober, 2024–Oktober 2025)**



**Grafik 2. Tingkat Dukungan Publik Terhadap Kehadiran Oposisi di DPR**



Pemerintah kemudian terlihat cukup mampu menjaga tingkat kepercayaan publik tersebut hingga 100 hari pertama setelah pelantikan. Survei kepuasan publik yang dilakukan sepanjang bulan Januari 2025 oleh berbagai lembaga, seperti Litbang KOMPAS, Indikator Politik Indonesia, LSI, Kedai KOPI dan *The Republic Institute* (TRI), menunjukkan tingkat kepuasan publik yang berkisar antara 72,5% hingga 82,2%. Angka ini lebih rendah dibandingkan ekspektasi publik dari survei sebelumnya, walaupun masih tergolong tinggi.



Image: Liputan 6

Namun, angka itu meredup setelah pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi gelombang protes publik atas pengesahan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada medio 17 Februari–25 Maret 2025. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) antara 20–25 Februari 2025 menemukan tingkat kepuasan publik yang anjlok ke tingkat 66,5%. Angka ini kemudian merayap naik dalam beberapa survei yang dilakukan pada bulan April, Mei, dan Juni oleh Rumah Politik Indonesia (RPI), LSI Denny JA dan *Indonesian Social Survey* (ISS) hingga bertengger pada tingkat 78% antara 11–20 Juli 2025. Sebuah pantulan balik (*rebound*) yang cukup baik meskipun hasilnya tidak setinggi rerata saat 100 hari awal pemerintahan.

Selepas itu, sebetulnya kejanggalan terjadi pasca gelombang protes massa pada bulan Agustus yang berawal dari Pati, Jawa Tengah (13 Agustus) dan berlanjut dengan demonstrasi *Agustus Kelabu* (25–31 Agustus). Sepanjang bulan Agustus hingga akhir September tidak ada satupun lembaga survei yang melakukan dan merilis hasil jajak pendapat atas tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Sebuah jeda yang cukup panjang. Satu lembaga survei, yaitu Indikator Politik Indonesia, sempat merilis temuan survei ke publik pada 26 September 2025 untuk periode 3–9 September, tetapi kemudian ditarik dari ranah publik.[13] Bukan sebuah kebetulan jika survei itu menemukan bahwa tingkat kepuasan publik terjun bebas ke tingkat 58,9% atau titik terendah dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

Temuan survei kembali marak dipublikasikan pada bulan Oktober dengan *framing* “tingkat kepuasan publik terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran”. Tercatat setidaknya empat lembaga yang menggunakan framing tersebut, yakni *Index Politica*, Indeks Politika Indonesia, Rumah Politik Indonesia, dan *Poltracking*. Ketiganya merilis hasil survei yang dilakukan sepanjang bulan Oktober. Survei yang dilakukan menemukan tingkat kepuasan publik yang tinggi berkisar antara 78,1–86,4%. Namun sayangnya, hingga laporan ini disusun, kami belum mendapatkan hasil survei dari lembaga–lembaga lain yang lebih dikenal luas oleh publik, seperti Litbang KOMPAS, LSI, LSI Denny JA, Indikator Politik Indonesia, maupun *Charta Politica*, sebagai pembandingan.

---

[13] Eka Yudha Saputra, “Indikator Bantah Merilis Survei yang Menunjukkan Tingkat Kepuasan terhadap Prabowo Anjlok,” *Tempo*, 27 September 2025, <https://www.tempo.co/politik/indikator-bantah-merilis-survei-yang-menunjukkan-tingkat-kepuasan-terhadap-prabowo-anjlok-2073955>



Image: AFP

Sebagai perbandingan, temuan dalam Grafik 2 bisa memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap kecenderungan umum yang berlangsung. Survei yang dilakukan Litbang KOMPAS pada 4-10 September 2024 menemukan bahwa sebagian besar publik (85,8%) menginginkan adanya kekuatan oposisi formal di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengimbangi pemerintahan yang baru. Survei ulang yang dilakukan pada 11-14 Agustus 2025, pasca protes massa pada Februari dan di awal gelombang demonstrasi baru di bulan yang sama menunjukkan dukungan yang tetap kuat bagi adanya paling tidak satu partai politik (parpol) oposisi di DPR meskipun jumlah turun dengan signifikan (58,4%). Hasil ini bisa dipahami sebagai tetap tingginya kesadaran publik atas kebutuhan kontrol terhadap pemerintah terkait dengan pilihan kebijakan yang mereka ambil dan tidak sepenuhnya memuaskan. Namun, di sisi lain, ini juga bisa dibaca sebagai meningkatnya skeptisme publik terhadap keinginan politik parpol untuk menjadi oposisi dan makin populernya pilihan protes jalanan yang juga mengindikasikan tersendatnya perjalanan penguatan demokrasi pada tahun pertama. Indikasi adanya masalah dalam perjalanan demokrasi ini juga tidak luput dari pengamatan publik. Temuan survei Indikator Politik Indonesia pada bulan September 2025, sebagai contoh, menemukan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kondisi pelaksanaan/praktik demokrasi hanya mencapai 51,1% (vs 42,6% yang tidak puas).

Secara umum, gambar cepat yang disajikan berbagai survei publik menunjukkan bahwa **Pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil meraih dan mempertahankan kepuasan publik yang relatif tinggi atas kinerjanya. Namun, survei juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan tersebut sangat rentan dipengaruhi oleh gelombang protes dan demonstrasi massa yang terjadi dalam satu tahun pemerintahannya.** Protes tersebut pada dasarnya mengindikasikan belum berjalan baiknya perjalanan penguatan demokrasi yang telah dilakukan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Agenda reformasi bidang hukum yang tidak beresonansi dengan aspirasi dan prioritas warga (contohnya UU TNI) mandeknya reformasi parpol di DPR, maupun brutalitas dan impunitas polisi merupakan penggerak utama protes jalanan tersebut. Oleh karena itu, penguatan demokrasi harus mulai menjadi prioritas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

## *D. Menakar Tempuhan: Analisis Perjalanan Demokrasi dalam Tiga Bidang Kunci*

Indikasi tersendatnya upaya penguatan demokrasi di tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran dapat ditelisik lebih jelas pada tiga isu kunci yang menjadi persilangan serta irisan berbagai program kerja dalam kelompok Asta Cita yang berbeda, yaitu: reformasi kepolisian, penanganan konflik di Papua, dan reformasi sektor hukum. Ketiganya bukan isu yang berdiri sendiri, melainkan simpul-simpul yang saling berkelindan dari satu persoalan pokok—bagaimana kekuasaan diatur, dijaga, dan dipertanggungjawabkan dalam sebuah negara demokratis.



# **VISI DAN 8 MISI ASTA CITA**

**VISI** | **Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**

Namun, analisis ini tidak berhenti pada tataran isu. Setiap bidang dibaca dengan merujuk pada Asta Cita, delapan agenda besar pembangunan nasional yang menjadi arah resmi pemerintahan Prabowo–Gibran. Asta Cita bukan sekadar dokumen politik, melainkan kerangka yang menuntut konsistensi antara visi dan praktik. Melalui Asta Cita, pemerintahan ini berjanji memperkuat reformasi hukum (Asta Cita 7), memantapkan sistem pertahanan dan keamanan nasional (Asta Cita 2), memperkokoh demokrasi dan hak asasi manusia (Asta Cita 1), serta membangun harmoni sosial yang berkeadilan (Asta Cita 8).

Karena itu, analisis di bab ini tidak hanya menilai tiga bidang kunci secara sektoral, tetapi juga menguji seberapa jauh arah pelaksanaannya sejalan dengan mandat Asta Cita itu sendiri. Apakah reformasi lembaga keamanan benar-benar diarahkan untuk melindungi warga dan memperkuat akuntabilitas? Apakah penanganan konflik di Papua memberi ruang bagi keadilan dan dialog? Dan sejauh mana reformasi hukum dijalankan secara transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan publik, bukan pada kekuasaan?

Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menghitung capaian absolut, melainkan untuk membaca watak perubahan kekuasaan. Pemerintahan Prabowo–Gibran tidak lahir di ruang kosong; ia melanjutkan satu dekade yang ditandai oleh keruntuhan mutu demokrasi, ketika kekuasaan politik terkonsentrasi di tangan eksekutif, lembaga hukum dijinakkan, dan ruang partisipasi publik menyempit atas nama stabilitas dan pembangunan. **Oleh karena itu, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah pemerintahan ini sudah bekerja, melainkan ke arah mana ia membawa keberlanjutan?** Apakah ia akan menutup mata dan berpangku tangan atas semua kerusakan yang diwariskan ataukah ia akan berani menggunakan mandatnya untuk mengubah pola kekuasaan yang diwarisi dari masa lalu—menggeser tata kelola negara dari yang tertutup, transaksional, dan elitis menuju pemerintahan yang bertumpu pada tanggung jawab publik, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak warga.

Reformasi kepolisian, penanganan konflik di Papua, dan reformasi sektor hukum kami pilih untuk menjadi cermin guna melihat apakah pemerintahan Prabowo–Gibran benar-benar konsisten menggunakan Asta Cita untuk menapaki jalan menuju demokrasi substantif, atau justru menjadikannya hanya sebagai kedok menutupi upaya untuk terus melemahkan sendi demokrasi di Indonesia.



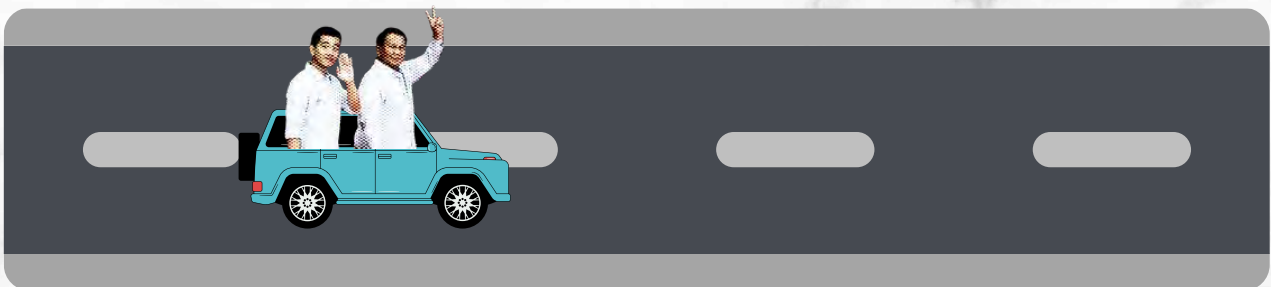
# 1 Reformasi Kepolisian

## Signifikansi

Reformasi kepolisian, sebagai bagian dari pembaruan sektor keamanan dan penegakan supremasi sipil, merupakan salah satu amanat penting dari gerakan Reformasi 1998. Selama Orde Baru, Polri berada di bawah struktur militer. Tugas utamanya bukan menegakkan hukum, apalagi melindungi warga, melainkan menjaga ketertiban versi penguasa yang sering berarti membungkam perbedaan suara.[14] Reformasi kemudian memisahkan Polri dari TNI dan menegaskan perannya sebagai institusi sipil di bawah Presiden, dengan mandat demokratis untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjunjung tinggi HAM sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Namun, dua dekade setelah pemisahan itu, cita-cita Reformasi belum terwujud. Pola kekerasan, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya pengawasan internal tetap berlangsung. Fakta ini menegaskan bahwa reformasi kepolisian bukan sekadar urusan internal institusi, melainkan fondasi bagi demokrasi itu sendiri. Polisi adalah representasi pertama negara di hadapan warga; ketika aparat bertindak represif dan sewenang-wenang, kepercayaan publik terhadap hukum ikut runtuh. Reformasi Polri karenanya menjadi kunci untuk memastikan kekuasaan negara dijalankan dalam kerangka hukum, bukan kekerasan.

## Status



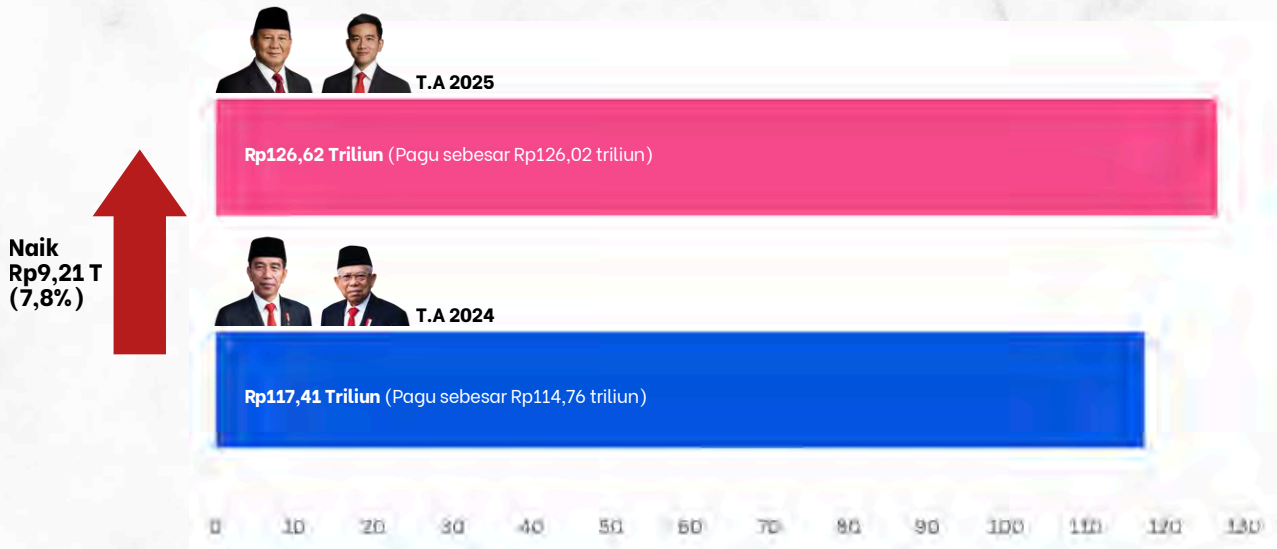
### 2. PADAT TERSENDAT

Inisiatif yang diambil bersifat inkremental, inkonsisten, tidak menyentuh akar masalah dan berjalan dengan sangat lambat.

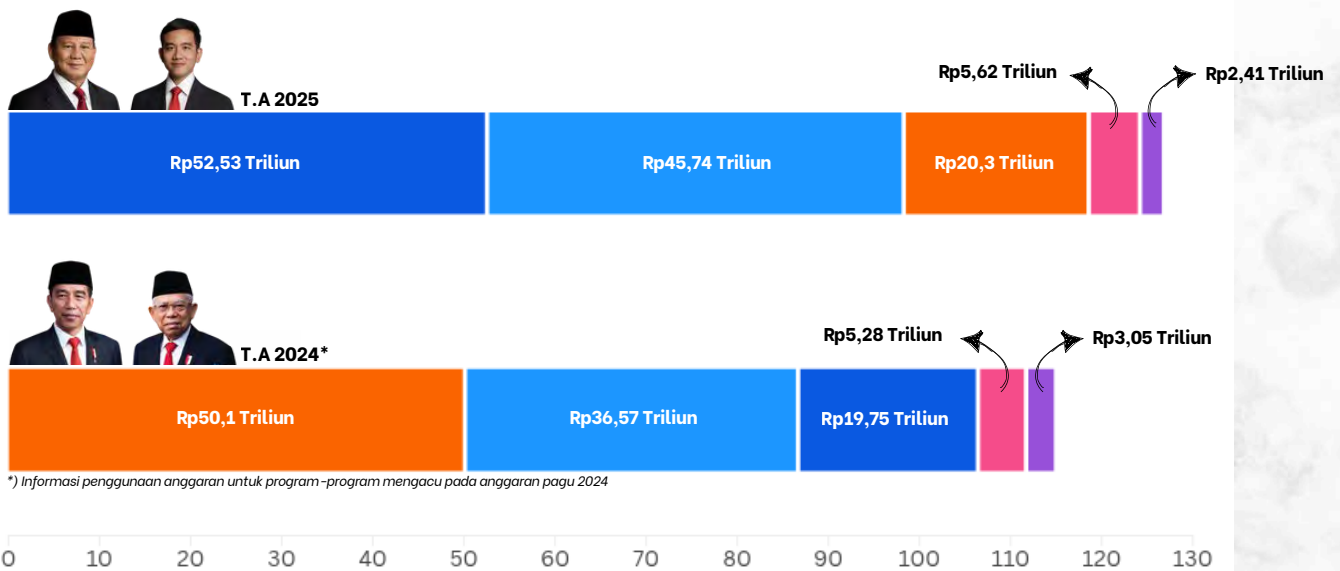
[14] Wildan Sena Utama, "Politics and Governance in Indonesia. The Police in the Era of Reformasi, written by Muradi," *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 171, no. 4 (2015): 593–595, <https://doi.org/10.1163/22134379-17104017>

## Statistik Kunci

**Grafik 3. Anggaran Polri  
Tahun Anggaran 2024 dan 2025**



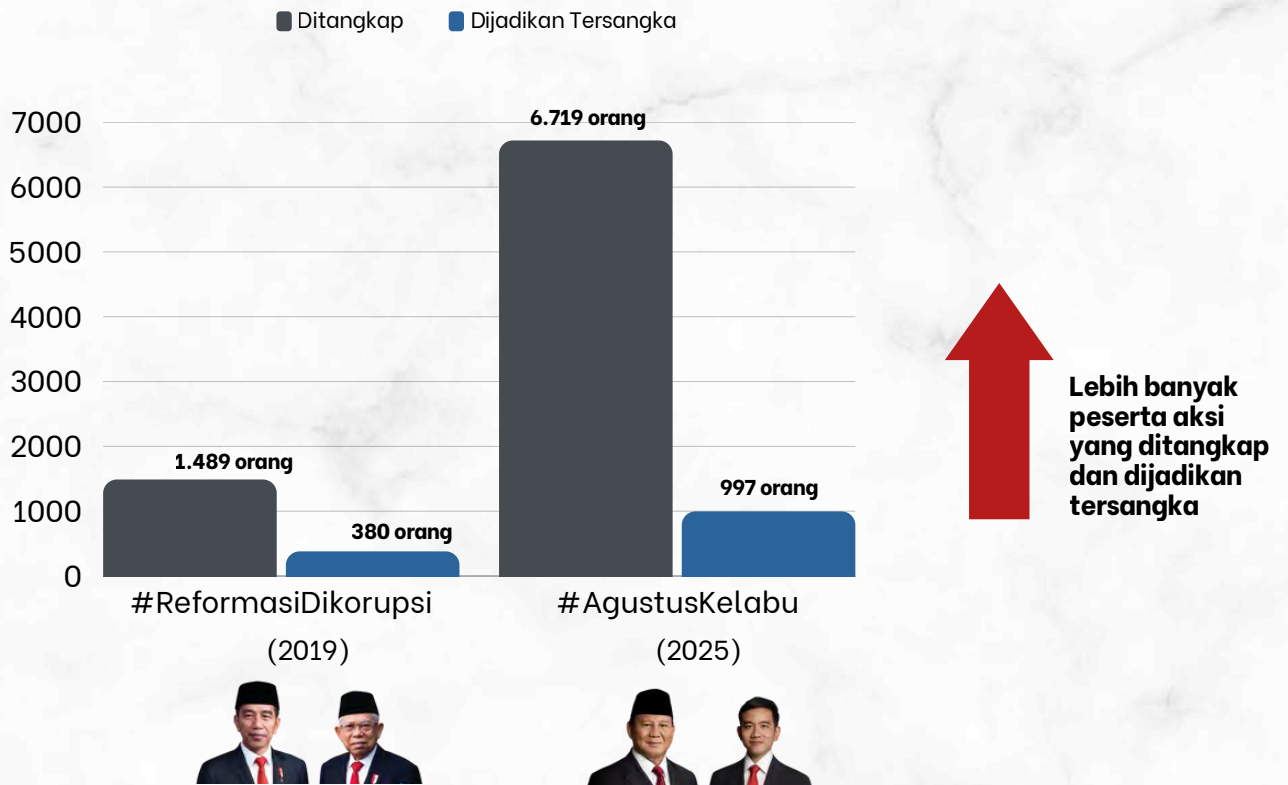
**Grafik 4. Penggunaan Anggaran Polri  
Tahun Anggaran 2024 dan 2025**



### Keterangan

- Pemeliharaan dan Ketertiban Masyarakat
- Peningkatan dan Modernisasi Alat Material Khusus serta Sarana dan Prasarana
- Profesionalisme dan Sumber Daya Manusia
- Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
- Dukungan Manajemen

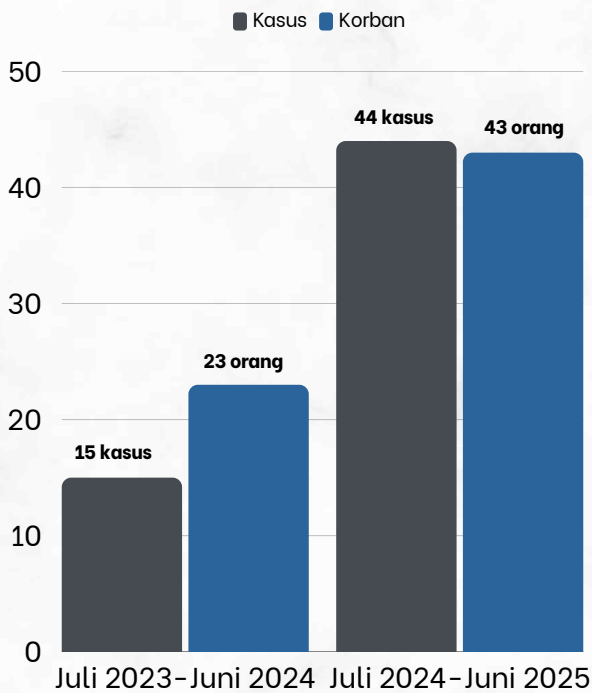
**Grafik 5. Jumlah Penangkapan Peserta Aksi  
#ReformasiDikorupsi (2019) dan #AgustusKelabu (2025)**



**Grafik 6. Peristiwa yang Melibatkan Polisi di bawah Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf vs Prabowo Gibran**



**Grafik 7. Peristiwa Salah Tangkap oleh Polisi**



**Grafik 8. Peristiwa Pembunuhan di Luar Hukum oleh Polisi**

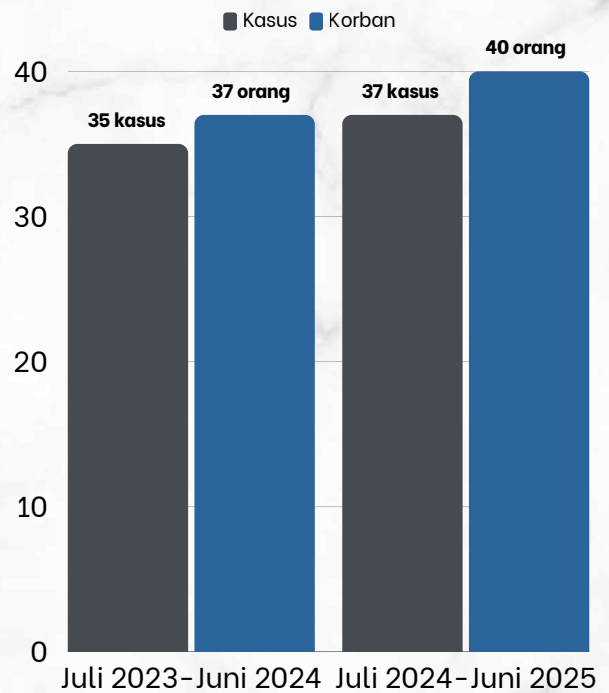




Image: Detik/AntaraFoto/Hafidz Mubarak

## **Perjalanan di masa Presiden Joko Widodo**

Di era Presiden Jokowi, Polri tumbuh menjadi “anak emas” pemerintah. Kewenangan mereka diperluas dan anggaran pun ditambah. Sayangnya, hal itu tak dibarengi dengan pengawasan yang ketat sehingga lembaga ini berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas yang minim.[15] Berikut adalah sejumlah kebijakan dan langkah yang ditempuh Presiden Jokowi terhadap institusi kepolisian selama masa pemerintahannya.

- **Polri menjadi salah satu lembaga dengan kucuran dana terbesar dari APBN.** Dari tahun ke tahun, anggarannya terus melonjak. Pada awal pemerintahan Jokowi (2014), anggarannya masih sekitar Rp44 triliun, naik menjadi Rp62 triliun pada 2015, Rp78 triliun pada 2016, dan Rp94 triliun di 2017.[16] Dua tahun berikutnya jumlahnya mendekati Rp100 triliun, hingga akhirnya menembus Rp117 triliun di tahun terakhir masa jabatan Jokowi.[17] Ironisnya, kenaikan anggaran Polri setiap tahun tidak diikuti dengan membaiknya kinerja, tapi justru dengan meningkatnya praktik kekerasan terhadap warga. Uang publik yang seharusnya menjamin keamanan rakyat malah dipakai untuk membiayai represi.[18] Setidaknya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Polri menghabiskan sekitar Rp26 triliun untuk perlengkapan pengendalian massa.[19] Kenaikan anggaran tanpa perbaikan perilaku aparat menunjukkan bahwa reformasi kepolisian di era Jokowi bukan diarahkan untuk memperkuat demokrasi, melainkan mempertebal cengkeraman negara atas warganya.

[15] Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), *Laporan Hari Bhayangkara 2024: “Reformasi Polisi Tinggal Ilusi”*, (Jakarta: Kontras, 1 Juli 2024), <https://kontras.org/laporan/laporan-hari-bhayangkara-2024-reformasi-polisi-tinggal-ilusi>

[16] Vonita Betalia, “ICW: Anggaran Fantastis Polri Belum Diimbangi Pelayanan yang Baik,” *inilah.com*, 9 Juli 2023, <https://www.inilah.com/icw-anggaran-fantastis-polri-belum-diiimbangi-pelayanan-yang-baik>

[17] Sultan Abdurrahman, “Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun,” *TEMPO*, 12 Juni 2024, <https://www.tempo.co/politik/komisi-iii-dpr-setujui-usulan-kenaikan-anggaran-polri-jadi-rp-165-31-triliun-50118>

[18] “100 Triliun untuk Kekerasan: Anggaran Polri dan Demokrasi yang Tercekik,” *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, 4 September 2025, <https://antikorupsi.org/id/100-triliun-untuk-kekerasan-anggaran-polri-dan-demokrasi-yang-tercekik>

[19] Dimas Waraditya Nugraha, “Dalam Lima Tahun, Polri Belanja Rp 2.6 Triliun untuk Alat Pengendali Massa,” *Kompas.id*, 29 Agustus 2025, <https://www.kompas.id/artikel/dalam-lima-tahun-polri-belanja-rp-26-triliun-untuk-alat-pengendali-massa>

- **Kepolisian berkembang menjadi instrumen politik yang efektif untuk mempertahankan kekuasaan.** Power dan Warburton menyebut bahwa di era Jokowi, lembaga penegak hukum seperti Polri “dimanipulasi secara partisan oleh eksekutif” untuk menekan oposisi dan mengamankan kepentingan rezim.[20] Polisi berulang kali dipakai untuk membungkam suara kritis: dari penangkapan Dandhy Laksono dan Ananda Badudu pada 2019 karena mengkritik kebijakan negara dan membantu logistik demonstrasi mahasiswa[21]; kriminalisasi terhadap Ravigo Patra yang dituduh menyebarkan provokasi setelah mengkritik pemerintah[22]; hingga gugatan hukum terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti oleh Luhut Binsar Pandjaitan setelah mengungkap dugaan keterlibatan bisnis pejabat di Papua.[23] Rezim juga menggunakan pasal makar untuk menjerat tokoh politik yang berseberangan, seperti Ratna Sarumpaet dan Rachmawati Soekarnoputri—yang akhirnya mentok tanpa bukti kuat, tapi cukup untuk menimbulkan efek gentar pada oposisi.[24]

Pola pembungkaman itu tidak hanya menyasar aktivis dan oposisi politik, tetapi juga pers sebagai pilar demokrasi yang memiliki fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Setidaknya pada periode kedua pemerintahan Jokowi, polisi tercatat sebagai aktor negara paling sering melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menunjukkan, pada 2023 terjadi 89 kasus serangan terhadap pers—angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir—dengan 17 di antaranya dilakukan oleh aparat kepolisian.[25] Tren itu berlanjut pada 2024, ketika AJI Indonesia mencatat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis, dan 19 di antaranya kembali melibatkan polisi.[26] Kekerasan terhadap jurnalis bukan sekadar pelanggaran etika profesi, melainkan bentuk represi negara terhadap hak publik untuk tahu dan hak jurnalis untuk bekerja tanpa rasa takut. Dengan membiarkan aparat menekan media yang kritis, pemerintah bukan hanya mengabaikan kebebasan pers, tetapi juga ikut menormalisasi pembungkaman.

[20] Power dan Warburton, “The Decline of Indonesian Democracy,” 2020.

[21] Rindi Nuris Velarosdela dan Sandro Gatra, “Penangkapan Dandhy Laksono dan Ananda Badudu yang Mengejutkan Publik,” *Kompas.com*, 28 September 2019, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/28/11281741/penangkapan-dandhy-laksono-dan-ananda-badudu-yang-mengejutkan-publik>

[22] Rindi Nuris Velarosdela dan Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “Kronologi Penangkapan Aktivis Ravigo Patra Versi Polisi dan Klarifikasi Kedubes Belanda,” *Kompas.com*, 28 April 2020, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/28/07332961/kronologi-penangkapan-aktivis-ravigo-patra-versi-polisi-dan-klarifikasi>

[23] “Haris Azhar dan Fatia jadi tersangka pencemaran nama baik Luhut, ‘siapa minta maaf asalkan Luhut memaparkan data tandingan hasil riset,’” *BBC News Indonesia*, 22 Maret 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60824315>

[24] “Kasak kusuk isu makar yang menjerat aktivis dan pensiunan jenderal,” *merdeka.com*, 3 Desember 2016, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasak-kusuk-isu-makar-yang-menjerat-aktivis-dan-pensiunan-jenderal.html>

[25] “89 Kasus Serangan terhadap Pers Indonesia pada 2023, Tertinggi Dalam Satu Dekade,” *Aliansi Jurnalis Independen (AJI)*, 13 Februari 2024, <https://aji.or.id/informasi/89-kasus-serangan-terhadap-pers-indonesia-pada-2023-tertinggi-dalam-satu-dekade>

[26] Yoanes Litha, “Indeks Keselamatan Meningkat, Tapi Banyak Jurnalis Masih Cemas,” *VOA Indonesia*, 24 Februari 2025, <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-keselamatan-meningkat-tapi-banyak-jurnalis-masih-cemas/7985947.html>

Dalam konteks ini, Polri tak lagi berdiri di antara negara dan rakyat, melainkan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan yang memastikan oposisi tetap sunyi dan demokrasi tetap terkekang.[27] Reformasi kepolisian yang seharusnya memperkuat profesionalisme justru berhenti pada slogan, sementara kekerasan, penyalahgunaan wewenang, dan impunitas makin mengakar.

- **Luasnya kewenangan Polri yang tak diimbangi dengan pengawasan yang kuat, baik internal maupun eksternal, membuat lembaga ini nyaris tanpa kontrol yang efektif.**[28] Dampaknya nyata: polisi berulang kali terlibat dalam kekerasan tanpa konsekuensi berarti. Contoh konkretnya adalah Tragedi Kanjuruhan pada 2022 yang menewaskan 135 orang akibat tembakan gas air mata di stadion, dua polisi yang menjadi terdakwa divonis bebas, dan satu lainnya hanya dihukum 1,5 tahun penjara.[29] Dalam kasus penembakan enam anggota FPI di KM 50, Komnas HAM menyebut peristiwa itu sebagai *unlawful killing*, tetapi hanya dua pelaku yang diseret ke pengadilan dan keduanya juga dibebaskan.[30] Bahkan dalam aksi #ReformasiDikorupsi 2019, yang menelan sedikitnya lima korban jiwa, penegakan hukum kembali minim: di Kendari, dua mahasiswa Universitas Halu Oleo tewas tertembak, dan enam polisi hanya dijatuhi hukuman disiplin ringan—teguran tertulis, penundaan pangkat dan gaji setahun, serta penempatan di tempat khusus selama 21 hari.[31] Impunitas di tubuh Polri bukan lagi anomali, tapi bagian dari sistem yang dibiarkan berjalan. Alih-alih memperkuat pengawasan dan menegakkan keadilan, Jokowi justru menerbitkan surat presiden yang membuka ruang pembahasan revisi UU Polri, meski publik menolak keras.[32] Langkah itu menandai sikap abai terhadap kritik dan menunjukkan bagaimana pemerintah lebih memilih melanggengkan kekuasaan ketimbang membenahi institusi yang terus mencederai rasa keadilan.

---

[27] Sarah Nuraini Siregar, Riaty Raffiudin, dan Firman Noor, "Democratic regression in Indonesia: Police and law-capacity democracy in Jokowi's administration (2014–2020)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 26, Issue 2, (November 2022), <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/72129/pdf>

[28] Rizaldi Ageng Wicaksono, Meila Nurul Fajriah, dan Bugivia Maharani Setiadji Putri, *Buku Saku Merindukan Hoegeng, Mengapa Polisi Perlu Direformasi?*, (Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, 2024).

[29] "Dua dari tiga polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan divonis bebas, keluarga korban kecewa: 'Sudah banyak yang meninggal, kok malah bebas'," *BBC News Indonesia*, 16 Maret 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64287089>

[30] "Meski Dinyatakan Bersalah, Hakim Vonis Bebas 2 Polisi Penembak Laskar FPI di KM 50, Kok Bisa?" *SuaraTernate.com*, 18 Maret 2022, <https://ternate.pikiran-rakyat.com/politik-hukum/amp/pr-2064011104/meski-dinyatakan-bersalah-hakim-vonis-bebas-2-polisi-penembak-laskar-fpi-di-km-50-kok-bisa?page=all>

[31] "Kematian dua mahasiswa di Kendari: Enam polisi Sulawesi Tenggara dikenai sanksi disiplin," *BBC News Indonesia*, 28 Oktober 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50204352>

[32] "Penerbitan Surpres RUU Polri: Bentuk Arogansi Presiden Jokowi yang Menelantarkan Kritik Publik dan Mengukuhkan Praktik Legislasi Otoriter," *KontraS*, 10 Juli 2024, <https://kontras.org/artikel/penerbitan-surpres-ruu-polri-bentuk-arogansi-presiden-jokowi-yang-menelantarkan-kritik-publik-dan-mengukuhkan-praktik-legislasi-otoriter>

- **Jokowi membangun hubungan patronase dengan polisi-polisi yang pernah dekat dengannya, menjadikan loyalitas politik sebagai mata uang yang lebih berharga ketimbang kinerja dan integritas.** Barternya jelas: dukungan dan kedekatan dibayar dengan kenaikan jabatan.[33] Pola ini terlihat dari karier para perwira yang dulu bekerja bersama Jokowi di Surakarta dan kini menduduki posisi penting di kepolisian maupun pemerintahan. Listyo Sigit Prabowo, misalnya, dipilih menjadi Kapolri meski melompati dua angkatan seniornya. Nana Sudjana, mantan Kapolresta Surakarta, diangkat menjadi penjabat Gubernur Jawa Tengah setelah pensiun. Sementara Ahmad Luthfi, mantan wakil Sigit, bukan hanya menjabat Kapolda Jawa Tengah, tetapi juga mendapat restu Jokowi untuk maju di Pilkada 2024—dan menang. Skema patronase semacam ini, menurut peneliti Jacqui Baker, menciptakan iklim di mana karier polisi ditentukan bukan oleh prestasi, melainkan oleh seberapa dekat mereka dengan kekuasaan.[34] Di tangan Jokowi, reformasi kepolisian yang seharusnya memperkuat profesionalisme justru berubah arah. Polri menjadi lembaga yang lebih loyal kepada presiden, bukan kepada publik.

[33] Diva Suuky Larasati, "Edisi 10 Tahun Jokowi: Geng Solo dan Pengaruh Presiden di Polri," *TEMPO*, 29 Juli 2024, <https://www.tempo.co/hukum/edisi-10-tahun-jokowi-geng-solo-dan-pengaruh-presiden-di-polri-35652>

[34] Fajar Pebrianto, "Geng Solo di Trunojoyo," *TEMPO*, 28 Juli 2024, <https://www.tempo.co/arsip/polisi-di-bawah-jokowi-24797>





Image: BPMI

## ***Tempuhan di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran***

**Tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan bahwa langkah yang diambil terhadap kepolisian tak banyak berubah dari era Jokowi.** Polri tetap dijadikan sebagai alat kendali sosial dan politik, bukan sebagai pelindung warga. Janji untuk menjadikan kepolisian sebagai pilar utama keamanan dalam negeri sekaligus penegak hukum yang berintegritas dan profesional—sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tentang penegakan hukum berkeadilan dan penguatan sistem keamanan nasional yang modern dan manusiawi—belum juga menampakkan wujudnya.

Alih-alih meninjau ulang arah reformasi kepolisian, pemerintahan Prabowo-Gibran justru memperkuat institusi yang tengah menjadi sorotan publik dengan suntikan dana yang lebih besar. Pada 2025, anggaran Polri mencapai Rp126,6 triliun, naik hampir Rp10 triliun dibanding tahun sebelumnya.[35] Porsi terbesar dari dana itu dialokasikan untuk modernisasi alat dan sarana prasarana (Rp45,74 triliun) serta pemeliharaan ketertiban masyarakat (Rp52,53 triliun), sementara program penguatan profesionalisme SDM justru menurun, dari Rp3,05 triliun pada 2024 menjadi Rp2,41 triliun pada 2025.[36] Pola ini menunjukkan bahwa negara masih memahami keamanan dalam kerangka pengendalian, bukan perlindungan warga. Bukan pembangunan karakter aparat yang diperkuat, melainkan peralatan dan logistiknya.

Ironisnya, di tengah sorotan publik atas kekerasan aparat dan krisis legitimasi pasca *Agustus Kelabu*, Presiden Prabowo bahkan menyiapkan kenaikan anggaran Polri untuk tahun 2026 menjadi Rp145,6 triliun, menjadikannya lembaga dengan anggaran terbesar ketiga setelah Badan Gizi Nasional dan Kementerian Pertahanan. Sekitar Rp73 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen, Rp58,1 triliun untuk modernisasi alat dan sarana-prasarana, dan Rp14,9 triliun untuk pemeliharaan ketertiban masyarakat. Sementara untuk peningkatan profesionalisme SDM, alokasinya hanya sekitar Rp1,2 triliun—kurang dari satu persen dari total anggaran.[37]

[35] Anggrainy, "Kapolri Ungkap Anggaran Polri 2025 Rp 126,62 T," 2024.

[36] Anggrainy, "Polri Paparkan Pagu Anggaran 2024," 2023

[37] Ilona Estherina, "Anggaran Polri Tahun Depan Melonjak Jadi Rp 145,6 Triliun, Untuk Apa Saja?" *TEMPO*, 29 Agustus 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/anggaran-polri-tahun-depan-melonjak-jadi-rp-145-6-triliun-untuk-apa-saja--2064356>

Lebih lanjut, tren kekerasan oleh polisi dalam tahun pertama masa pemerintahan Prabowo–Gibran masih menunjukkan pola represif yang sama dengan era sebelumnya. Data KontraS untuk periode Juli 2024–Juni 2025 mencatat 602 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri: 411 penembakan, 38 penyiksaan, dan 44 salah tangkap yang menyebabkan 8 korban meninggal dunia.[38] Angka ini menegaskan bahwa pergantian presiden, selaku atasan Polri, tidak diikuti oleh perubahan perilaku aparat di lapangan.

Puncaknya terlihat pada demonstrasi besar yang berlangsung antara 25–31 Agustus 2025, peristiwa yang kemudian dikenal luas sebagai Agustus Kelabu. Seperti pola yang berulang dari tahun ke tahun, aparat menghadapi gelombang kemarahan warga dengan pengerahan besar-besaran pasukan dan penggunaan kekuatan berlebihan di berbagai kota. Menurut catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), setidaknya lebih dari 3.000 orang ditangkap selama aksi yang berlangsung dari 25–31 Agustus 2025 di 20 kota di Indonesia. Tak hanya itu, sekitar 1.042 orang mengalami luka-luka, dan 10 orang meninggal dunia, termasuk Affan.[39]

Di tengah sorotan publik atas brutalitas aparat, Kapolri Listyo Sigit Prabowo justru menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Kepolisian RI yang memberikan legitimasi kepada polisi untuk menindak para demonstran pelaku kerusuhan menggunakan senjata api. Regulasi itu justru akan menjustifikasi tindakan represif aparat saat menangani aksi dan berbahaya karena bisa menjadi instrumen legal untuk membenarkan kekerasan.[40]

Tidak sampai di situ, Presiden Prabowo juga menolak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kekerasan pada akhir Agustus. Presiden Prabowo justru menyerahkan seluruh penyelidikan kepada kepolisian–institusi yang justru paling banyak dilaporkan sebagai pelaku pelanggaran.[41] Padahal, tanpa TGPF, fakta-fakta kunci tetap tersembunyi. Kebenaran sulit muncul, dan keadilan hanya jadi kata kosong.[42]

---

[38] "Rilis Hari Bhayangkara 2025," KontraS, 2025,

[39] Faisal Irfani, "Teka-teki orang hilang dalam demo Agustus dan dugaan teror aparat – 'Tolong bantu temukan anak saya,'" *BBC News Indonesia*, 18 September 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj07my805lno>

[40] Vedro Imanuel Girsang, "Ancaman Kekerasan di Balik Aturan Penanganan Demonstrasi," *TEMPO*, 2 Oktober 2025, <https://www.tempo.co/hukum/panduan-penanganan-demonstran-anarkistis-2075371>

[41] Nino Citra Anugrahanto, Iqbal Basyari, Nina Susilo, "Presiden Urung Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Agustus, Komitmen Proses Hukum Dipertanyakan," *Kompas.id*, 17 September 2025, <https://www.kompas.id/artikel/presiden-urung-bentuk-tim-pencari-fakta-kerusuhan-agustus-komitmen-proses-hukum-dipertanyakan>

[42] "Tanpa Pembentukan TGPF Kasus Kerusuhan Agustus 2025, Keadilan Tak Akan Bisa Ditegakkan," *Kurawal Foundation*, 29 September 2025, <https://www.kurawalfoundation.org/senandika/tanpa-tgpf-kasus-agustus-2025-keadilan-tak-bisa-ditegakkan>

Penolakan membentuk TGPF bukan satu-satunya tanda keengganan pemerintah menegakkan akuntabilitas. Di tengah tekanan publik yang masif pasca-*Agustus Kelabu*, Presiden Prabowo juga memilih mempertahankan Kapolri Listyo Sigit Prabowo di posisinya, meski berbagai organisasi masyarakat sipil dan tokoh publik menuntut pencopotannya sebagai bentuk tanggung jawab atas brutalitas aparat.[43] Padahal, langkah mengganti pucuk pimpinan Polri bisa menjadi sinyal awal keseriusan pemerintah dalam mereformasi Polri.[44]

Di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran, pola penanganan kritik publik juga nyaris tak berbeda dari era Jokowi: polisi kembali dibiarkan menangkap dan mengkriminalisasi warga yang berdemonstrasi. Alih-alih menjamin kebebasan berekspresi, negara justru memperluas ruang represi. YLBHI mencatat, sepanjang 2025, sedikitnya 5.444 orang ditangkap dan 997 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dalam rentetan aksi protes, mulai dari demonstrasi menolak revisi UU TNI, peringatan Hari Buruh, hingga gelombang besar *Agustus Kelabu*. Pemerintah membenarkan langkah aparat dengan membangun narasi bahwa demonstrasi besar itu hasil provokasi dan bagian dari gerakan makar, sebuah tuduhan yang efektif digunakan untuk menjustifikasi kekerasan dan mempersempit ruang kebebasan warga.[45]

Terlepas dari keputusan-keputusan pemerintahan Prabowo–Gibran yang cenderung mempertahankan status quo, pemerintah sempat menyatakan akan membentuk tim reformasi Polri. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut bahwa komisi ini akan mengkaji ulang tugas, wewenang, kedudukan, dan ruang lingkup kepolisian. Rencana itu akan ditegaskan melalui keputusan presiden (keppres). Janji ini menumbuhkan harapan bahwa pemerintah akan mengambil langkah korektif setelah gelombang kekerasan dan krisis kepercayaan publik terhadap Polri.[46]

Namun, hingga laporan ini ditulis—lebih dari sebulan sejak pernyataan tersebut—tak ada kejelasan soal mandat, struktur, maupun tenggat kerja komisi yang dimaksud. Tak ada pembentukan tim, tak ada rancangan keppres, tak ada tenggat yang jelas. Di lapangan, kekerasan terus terjadi, sementara publik menunggu arah reformasi yang tak kunjung tiba.

---

[43] Ady Thea DA, "Brutalitas Kepolisian Terus Berulang, Koalisi Minta Kapolri Listyo Sigit Dicopot," *HukumOnline.com*, 29 Agustus 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/brutalitas-kepolisian-terus-berulang--koalisi-minta-kapolri-listyo-sigit-dicopot-1t68b1652b40283/>

[44] Rakli Almughni, "Pengamat Politik Sebut Prabowo Seharusnya Copot Kapolri Listyo Sigit pada 28 Agustus," *Tribunnews.com*, 7 September 2025, <https://m.tribunnews.com/nasional/7725187/pengamat-politik-sebut-prabowo-seharusnya-copot-kapolri-listyo-sigit-pada-28-agustus>

[45] Andi Adam Faturahman, "Mengapa Aktivistis Semakin Terintimidasi pada Pemerintahan Prabowo–Gibran," *TEMPO*, 21 Oktober 2025, <https://www.tempo.co/politik/mengapa-aktivis-semakin-terintimidasi-pada-pemerintahan-prabowo-gibran-2081784>

[46] Haryanti Puspa Sari dan Nawir Arsyad Akbar, "Prabowo Akan Bentuk Komisi Reformasi Polri, Kaji Ulang Tugas dan Wewenang Polisi," *Kompas.com*, 17 September 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/12063481/prabowo-akan-bentuk-komisi-reformasi-polri-kaji-ulang-tugas-dan-wewenang>

## 2 Penanganan konflik di Papua

### Signifikansi

Papua, yang kini terbagi menjadi 6 (enam) provinsi pasca revisi kebijakan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, merupakan wilayah dengan rekam jejak konflik bersenjata paling panjang di Indonesia. Gugatan atas legitimasi politik integrasi Papua ke Indonesia berkelindan dengan diskriminasi rasial terhadap Orang Asli Papua (OAP) berhadapan langsung dengan pendekatan keamanan yang digunakan negara. Ini membuat tingginya insiden kekerasan, masifnya represi kebebasan sipil warga, serta maraknya pelanggaran HAM di Papua. Pada periode kedua Joko Widodo, operasi keamanan makin berlangsung intensif, di mana dalam periode tahun 2019–2021 tercatat 46,286 personil TNI dan Polri dikirim ke Papua.[47]

### Status



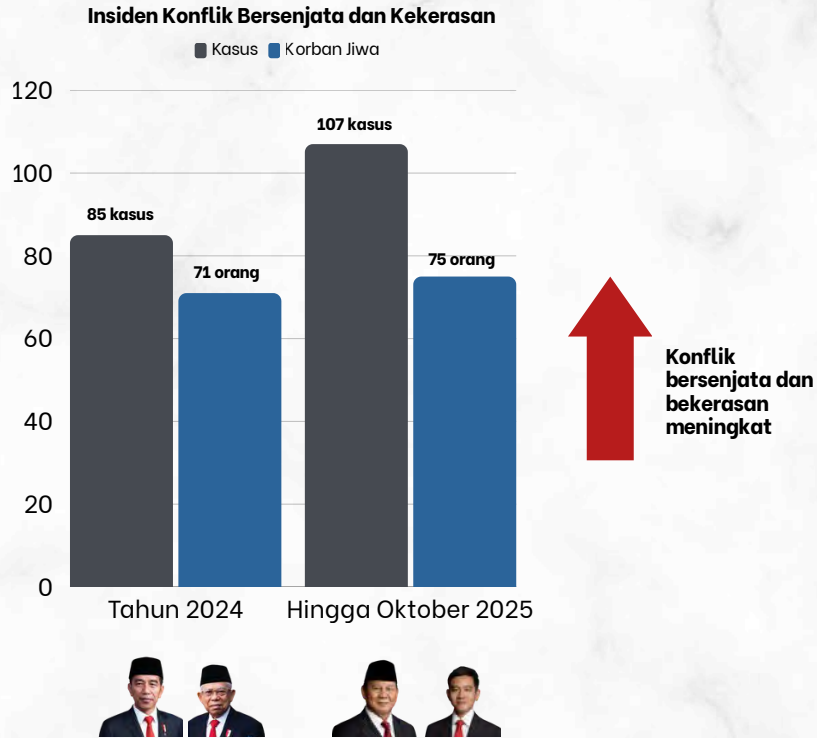
#### 1. MACET

Tidak ada inisiatif nyata, atau langkah yang diambil keliru sehingga tak ada perubahan atau keadaan justru memburuk.

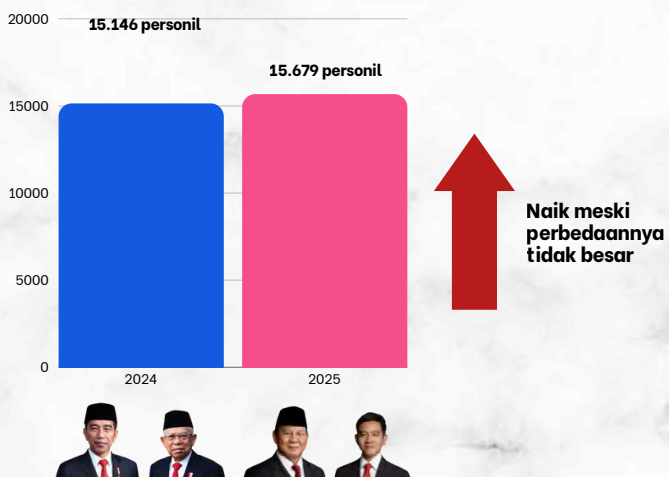
[47] "46,286 troops sent to Papua from 2019 to 2021: ELSHAM," *Jubi.id*, 24 Juni 2022, <https://en.jubi.id/46286-troops-sent-to-papua-from-2019-to-2021-elsham/>

## Statistik Kunci

**Grafik 9. Insiden Konflik Bersenjata dan Kekerasan di Papua**



**Grafik 10. Mobilisasi Pasukan TNI dan Polri**



**Grafik 11. Jumlah Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata**

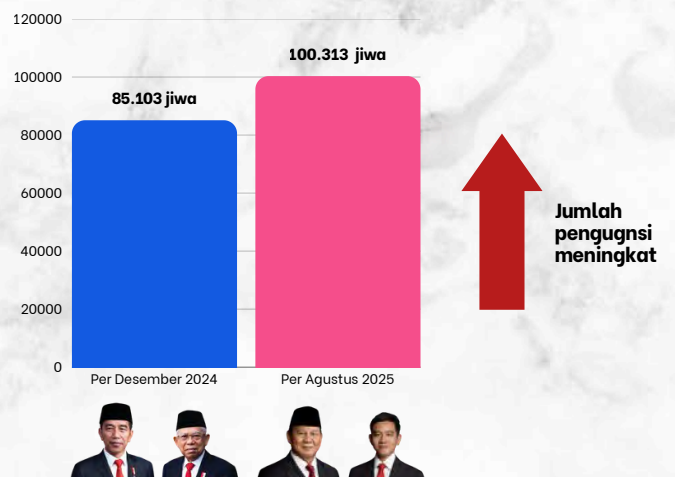




Image: BPMI

## ***Perjalanan di masa Presiden Joko Widodo***

Presiden Jokowi menjanjikan dialog dan damai di Papua, namun yang justru ditinggalkan adalah konflik yang semakin dalam dan kekerasan yang kian larut.[48] Secara umum, beberapa kebijakan kunci di Papua adalah:

- **Perluasan infrastruktur fisik**, khususnya melanjutkan pembangunan jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 km.[49] Proyek ini mendapat kritik tajam dari mantan Gubernur Papua Lukas Enembe karena tidak berdampak banyak pada kesejahteraan OAP: *"Itu bukan untuk orang Papua. Orang Papua tidak pernah lewat jalan yang dibangun, (karena) mereka tidak punya apa-apa. Orang Papua butuh kehidupan, bukan pembangunan"*[50]. Infrastruktur ini kemudian memang lebih ditujukan untuk memudahkan ekspansi proyek ekonomi ekstraksi sumber daya alam di Papua serta mobilisasi TNI dan Polri untuk mengamankan proyek-proyek tersebut.[51]

[48] Fitriyan Zamzami, "Sepuluh Tahun di Papua, dari Paniai Hingga Pemekaran," *Republika*, 20 Oktober 2024,

[49] Fikri Halim dan Mohammad Yudha Prasetya, "10 Tahun Memimpin, Jokowi Bangun Ribuan Kilometer Jalan di Papua," *VIVA*, 5 Oktober 2024, <https://www.viva.co.id/bisnis/1758227-10-tahun-memimpin-jokowi-bangun-ribuan-kilometer-jalan-di-papua>

[50] Elvariza Opita, "Gubernur Lukas Enembe Kritik Trans Papua: Kami Butuh Kehidupan, Bukan Pembangunan," *wowkeren.com*, 23 Agustus 2019, <https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00269758.html>

[51] "Militerisme yang Mengakar, Pendekatan "Kesejahteraan", dan Politik Pengecualian di West Papua," *Tapol*, 8 Desember 2020, <https://tapol.org/id/publications/militerisme-yang-mengakar-pendekatan-kesejahteraan-dan-politik-pengecualian-di-west>

- **Akselerasi proyek ekstraksi sumber daya alam skala besar.** Proyek perkebunan sawit skala besar di Tanah Merah, dengan luasan 280.000 hektar[52] maupun upaya eksplorasi tambang emas Blok Wabu di Intan Jaya seluas 9.118 hektar[53] merupakan contoh dari proses akselerasi tersebut. Namun, contoh paling nyata adalah Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan, yang mencakup proyek pengembangan perkebunan tebu dan *bioethanol* yang dikelola 10 perusahaan dan didukung Kementerian Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal dengan pemberian izin dengan lahan seluas lebih dari 500.000 ha di bawah kontrol *First Resources Group* dan/atau *Fangiono Agro Plantation* (FAP) Agri Group, dan Martua Sitorus, pemilik dan pendiri KPN Corp. Group.[54] Proyek ini juga memiliki komponen proyek optimalisasi lahan pertanian pada enam distrik seluas 40.000–100.000 ha yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan TNI, serta proyek cetak sawah baru dikelola oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan perusahaan swasta *Jhonlin Group* milik Haji Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, dengan luas sejuta hektar.
- **Mempermudah pembentukan daerah otonomi baru (DOB).** Revisi kebijakan Otonomi Khusus melalui UU No. 2 Tahun 2021 memudahkan pemerintah pusat untuk membentuk daerah otonomi baru di Papua. Segera setelah revisi ini disahkan DPR, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meresmikan tiga DOB di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, pada November 2022[55], disusul Provinsi Papua Barat Daya pada Desember 2022.[56] Pemerintah mendorong DOB untuk memperkecil ruang kendali, mendekatkan pelayanan publik, dan memperluas distribusi anggaran negara sehingga kesejahteraan bisa tercapai di Papua.[57] Namun, penolakan yang masif di kalangan warga Papua menunjukkan kecurigaan bahwa kebijakan itu merupakan instrumen untuk memecah formasi elit politik lokal di Papua, meningkatkan daya tawar pemerintah pusat dalam kebijakan pembangunan, serta menggeser konflik dari vertikal menjadi horizontal.[58]

[52] "Pemain Baru Mulai Babat Hutan Dalam Proyek Perkebunan Sawit Raksasa di Papua," *The Gecko Project*, 24 April 2020, <https://thegeckoproject.org/id/articles/new-player-starts-clearing-rainforest-in-world-s-biggest-oil-palm-project/>

[53] "Penambangan Blok Wabu akan 'berakibat bencana' di tengah represi terhadap OAP," *Amnesty International Indonesia*, 21 Maret 2022, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/penambangan-blok-wabu-akan-berakibat-bencana-di-tengah-represi-terhadap-oap/03/2022/>

[54] Aryo Bhawono, "Merauke Menolak Babak Belur Karena Food Estate," *Betahita*, 17 Oktober 2024, <https://betahita.id/news/detail/10633/merauke-menolak-babak-belur-karena-food-estate.html?v=1729118191>

[55] "Mendagri Resmikan Tiga Provinsi Baru di Papua," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 11 November 2022, <https://setkab.go.id/mendagri-resmikan-tiga-provinsi-baru-di-papua/>

[56] "Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan, Indonesia Sekarang Miliki 38 Provinsi," *Komdigi*, 12 Desember 2022, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/provinsi-papua-barat-daya-diresmikan-indonesia-sekarang-miliki-38-provinsi>

[57] "Konsekuensi Tiga DOB Provinsi Papua terhadap Masyarakat Adat," *Indonesia Parliamentary Center*, 17 November 2022, <https://ipc.or.id/konsekuensi-tiga-dob-provinsi-papua-terhadap-masyarakat-adat/>

[58] "Kenapa Orang Papua Menolak Otsus dan Pemekaran Wilayah DOB," *CNN Indonesia*, 11 Mei 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511092523-20-795332/kenapa-orang-papua-menolak-otsus-dan-pemekaran-wilayah-dob>

- **Perluasan skala operasi militer dan keamanan.** Eskalasi pendekatan keamanan dan operasi tempur berlangsung secara ajeg dalam periode kedua pemerintahan Jokowi. Polri membangun Operasi Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi dari tahun 2018 hingga Januari 2021, untuk menghadapi OPM-TPNPB.[59] Operasi ini berubah menjadi Operasi Damai Cartenz pada Januari 2022 yang merupakan operasi gabungan Polri dan TNI di bawah koordinasi Polda Papua dengan fokus di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, dengan sasaran prioritas di Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Mimika, Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, Nduga, Jaya Wijaya, dan Jayapura. Awalnya dijangkakan berakhir pada Desember 2022, operasi ini mengalami perpanjangan dan diteruskan hingga tahun 2025.[60] Di sisi lain, meskipun terlibat dalam Operasi Cartenz, TNI secara terpisah membentuk Pasukan Komando Operasional (Koops) Habema pada awal tahun 2024 dengan beranggotakan pasukan khusus dari tiga matra di TNI, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.[61] Hanya saja, eskalasi ini dinilai sebagai bentuk operasi militer ilegal tanpa dasar hukum yang jelas. Pasal 7 ayat (4), UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah dijadikan dasar pembentukan Satgas Koops Habema, tapi hingga hari ini Presiden Republik Indonesia belum memberikan kejelasan status daerah Darurat Operasi Militer atau Darurat Operasi Sipil, seperti dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. [62] Dengan demikian, tidak ada kebijakan keamanan pemerintah yang legal secara hukum di Papua berdasarkan peraturan perundangan. Operasi keamanan yang ada adalah kebijakan internal TNI dan Polri yang bertindak seakan-akan sebagai otoritas pemerintahan sendiri dan ini tidak pernah dikoreksi.[63]

---

[59] Irfan Fathurohman, "Beda Nama Sama Rasa: Satgas Nemangkawi Berganti Damai Cartenz," *IDN Times*, 31 Januari 2022, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/beda-nama-sama-rasa-satgas-nemangkawi-berganti-damai-cartenz-00-vdzm7-3xp31d>

[60] Dani Aswara, "Pemerintah Lanjutkan Operasi Damai Cartenz di Tahun 2025," *TEMPO*, 11 Desember 2024, <https://www.tempo.co/hukum/pemerintah-lanjutkan-operasi-damai-cartenz-di-tahun-2025-1179887>

[61] "Mengenal Koops Habema Bentuk Panglima TNI yang Tembak 18 OPM," *CNN Indonesia*, 16 Mei 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250515191801-20-1229620/mengenal-koops-habema-bentukan-panglima-tni-yang-tembak-18-opm>

[62] "Atgas Operasi Habema Bentuk Kogabwilhan III Diduga Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat di Kabupaten Intan Jaya," *YLBHI*, 29 Mei 2025, <https://ylbhi.or.id/papua/atgas-operasi-habema-bentukan-kogabwilhan-iii-diduga-melakukan-tindak-pidana-pelanggaran-ham-berat-di-kabupaten-intan-jaya/>

[63] Budi Hernawan, "Operasi Militer di Papua dan Insurgensi TPNPB adalah Konflik Bersenjata Non-Internasional," *Project Multatuli*, 31 Agustus 2025, <https://projectmultatuli.org/operasi-militer-di-papua-dan-insurgensi-tpnpb-adalah-konflik-bersenjata-non-internasional/>



Image: Gerindra

### ***Tempuhan di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran***

Pilihan langkah kebijakan yang diambil pemerintahan Prabowo-Gibran dalam tahun pertamanya menunjukkan bahwa pendekatan keamanan masih menjadi primadona. Alih-alih memberikan ruang yang lebih besar pada perlindungan HAM dan penegakan hukum seperti yang diamanatkan Asta Cita, Papua justru dipandang dalam lensa penguatan kehadiran TNI di perbatasan dan wilayah terluar. Warisan kebijakan pemerintahan Jokowi telah membukakan jalan bagi menguatnya peran militer di wilayah tersebut.

Sebagai contoh, pembentukan DOB memberikan justifikasi bagi dibentuknya unit komando teritorial baru di Papua. Presiden Prabowo meresmikan Kodam XXIV/Mandala Trikora, yang berpusat di Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai bagian dari enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Indonesia pada Minggu, 10 Agustus 2025.[64] Dengan peresmian ini, Kodam itu akan menjadi Kodam ketiga yang berdiri di Papua setelah Kodam XVII/Cenderawasih, dan Kodam XVIII/ Kasuari. Di sisi lain, pada Desember 2024, pemerintah juga memutuskan untuk melanjutkan Operasi Cartenz pada tahun 2025 dengan cakupan operasi yang diperluas, dari sembilan daerah awal, untuk meminimalisir pergerakan TPNPB.[65]

[64] "Presiden Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru Berikut Inilah Daptarnya," *TarungNews.com*, 10 Agustus 2025, <https://www.tarungnews.com/berita-foto/18105/presiden-prabowo-resmikan-6-kodam-baru-berikut-inilah-daptarnya.html>

[65] Dani Aswara, "lanjutkan Operasi Damai Cartenz di Papua Tahun Depan, Polri: Konsepnya Masih Penegakan Hukum," *TEMPO*, 12 Desember 2024, <https://www.tempo.co/hukum/lanjutkan-operasi-damai-cartenz-di-papua-tahun-depan-polri-konsepnya-masih-penegakan-hukum-1180498>

Akselerasi proyek ekstraksi sumber daya alam secara besar yang secara formal melibatkan TNI dalam pengelolaannya juga memberikan justifikasi ekstra bagi mobilisasi militer di Papua. Salah satu contoh menonjol adalah keterlibatan TNI dalam proyek strategis nasional (PSN) Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke yang diikuti dengan pembentukan lima Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (Yonif PDR) di Papua—yakni Yonif 801/Ksatria Yuddha Kentsuwri (Kabupaten Keerom), Yonif 802/Wimane Mambe Jaya (Kabupaten Sarmi), Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha (Kabupaten Boven Digoel), Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha (Kabupaten Merauke), dan Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap (Kabupaten Sorong) pada Oktober 2024.[66] Di sisi lain, melalui pembicaraan pada bulan Juli 2025, TNI akan membantu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penyelesaian proyek Jalan Trans Papua.[67] Pemerintah menargetkan proyek ini rampung pada era pemerintahan Presiden Prabowo.

Mobilisasi pasukan dan intensifnya operasi tempur untuk menekan ruang Gerak TPNPB berimplikasi langsung dengan tingginya insiden kekerasan di Papua dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Kepolisian Daerah (Polda) Papua mencatat, selama semester I 2025, yakni terhitung pada Januari–Juni 2025, ada 101 insiden yang melibatkan TPNPB di wilayah hukum Polda Papua.[68] Wilayah sebaran konflik menjadi makin luas ketika TPNPB pada April 2025 menetapkan 9 daerah di Papua masuk wilayah perang yang meliputi Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maybrat, Dogiyai, Paniai dan Deiyai.[69] Jika dibandingkan dengan peta yang disusun Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) berdasarkan data berbagai media dan informan kunci dari Januari 2010 hingga Maret 2022 (lihat Gambar 1), terlihat perubahan pola konflik: wilayah Maybrat, Dogiyai, Paniai, dan Deiyai yang dulu tergolong berintensitas rendah, kini berubah menjadi titik-titik baru dengan eskalasi kekerasan tinggi dalam konflik bersenjata di Papua.

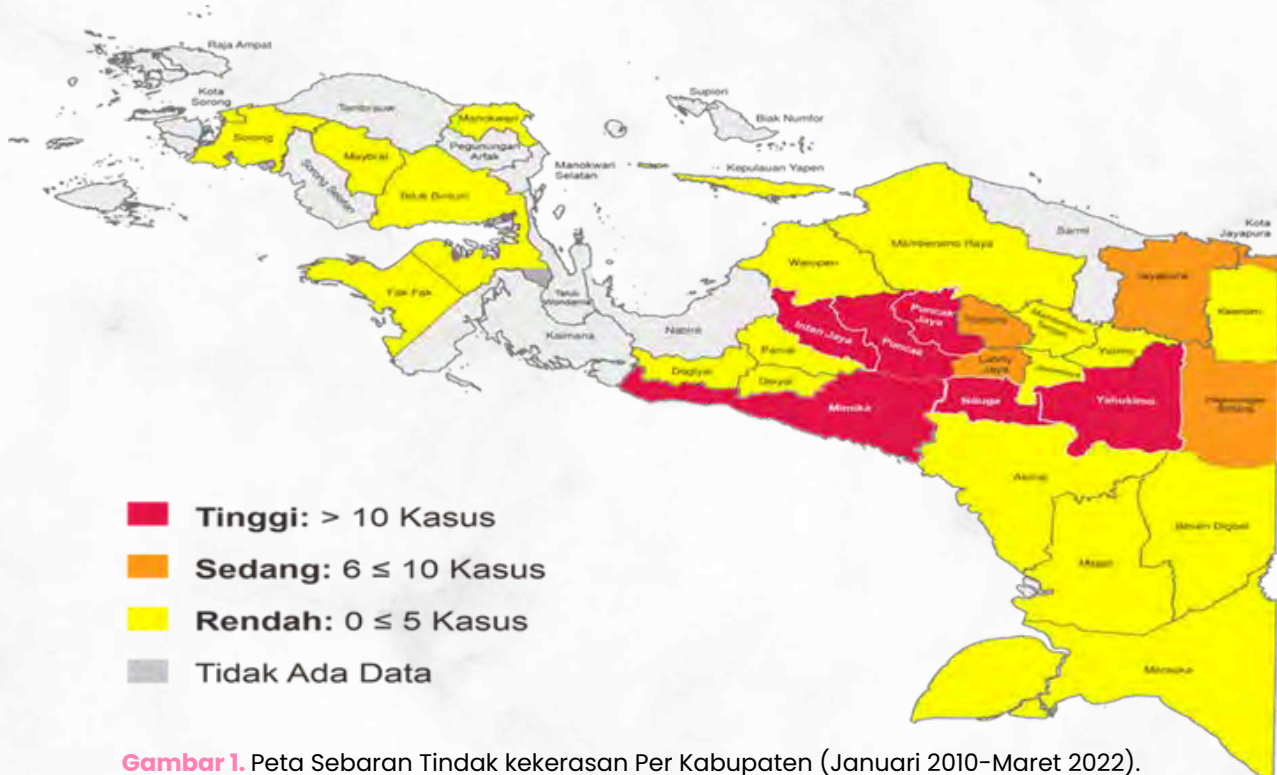
---

[66] Novali Panji Nugroho, "Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua," *TEMPO*, 3 Oktober 2024, <https://www.tempo.co/politik/baru-dibentuk-ini-daftar-5-yonif-penyangga-daerah-rawan-di-papua-3161>

[67] Shafira Cendra Arini, "Proyek Jalan Trans Papua Belum Beres, TNI Bakal Diterjunkan," *detikfinance*, 21 Juli 2025, <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-8022611/proyek-jalan-trans-papua-belum-beres-tni-bakal-diterjunkan>.

[68] Roberthus Yewen dan Andi Hartik, "Selama 6 Bulan, KKB di Papua 101 Kali Berulah, Korban Meninggal 43 Orang," *Kompas.com*, 3 Juli 2025, <https://regional.kompas.com/read/2025/07/03/080442178/selama-6-bulan-kkb-di-papua-101-kali-berulah-korban-meninggal-43-orang>.

[69] Sahril Kadir, "9 Daerah di Papua Masuk Wilayah Perang, Ada Dimana Saja?," *Manadoku*, 20 April 2025, <https://manado.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2369256721/9-daerah-di-papua-masuk-wilayah-perang-ada-dimana-saja?page=3>



**Gambar 1.** Peta Sebaran Tindak kekerasan Per Kabupaten (Januari 2010-Maret 2022).  
 Sumber: Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada

Sementara itu, tidak ada pendekatan maupun kebijakan baru yang didorong oleh pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menangani krisis pengungsi di Papua. Dorongan untuk membentuk tim kemanusiaan yang fokus menangani para pengungsi di berbagai kabupaten juga belum mendapat respon dari presiden.[70] Salah satu implikasi dari tidak adanya dasar hukum yang tegas dari operasi tempur dan militer yang dilakukan di Papua adalah tidak adanya akses dan jaminan perlindungan bagi lembaga-lembaga kemanusiaan nasional dan internasional untuk memberikan layanan kepada korban/pengungsi.[71] Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya penanganan dalam skala terbatas, seperti dalam bentuk pemberian bantuan sosial (bansos) dan pangan di tingkat daerah, serta memfasilitasi anak-anak pengungsi untuk bersekolah.[72] Dari pemerintah pusat, ada skema Program Keluarga Harapan (PKH) Adaptif untuk menjangkau korban bencana sosial. Namun, penanganan terhadap mereka tampaknya masih belum optimal. Skema-skema bantuan yang ditawarkan belum mampu melindungi mereka dari kerentanan. Ini karena bantuan bersifat insidental, berjangka pendek, dan proses penanganannya cenderung lambat.

[70] Yulianus Magai, "Legislator dari Nduga Ini Minta Presiden Prabowo Bentuk Tim Khusus Tangani Pengungsi di Tanah Papua," *Tribun-Papua.com*, 10 Oktober 2025, <https://papua.tribunnews.com/news/119851/legislator-dari-nduga-ini-minta-presiden-prabowo-bentuk-tim-khusus-tangani-pengungsi-di-tanah-papua>.

[71] Hernawan, "Operasi Militer di Papua," 2025.

[72] Sylvia Andriyani Kusumandari dan Asep Kurniawan, "Pengungsi internal di Papua hadapi kerentanan berlapis - 3 langkah mengoptimalkan perlindungan sosial bagi mereka," *The Conversation*, 25 November 2023, <https://theconversation.com/pengungsi-internal-di-papua-hadapi-kerentanan-berlapis-3-langkah-mengoptimalkan-perlindungan-sosial-bagi-mereka-218026>

Desakan kepada Presiden Prabowo untuk membuka kembali pintu dialog bagi penyelesaian konflik Papua juga belum terjawab. Jaringan Damai Papua (JDP), sebagai contoh, mendorong agar persiapan dialog Papua–Jakarta segera dimulai paling lambat akhir 2025 atau awal 2026.[73] Pemerintah juga tidak merespon tawaran terbuka TPNPB pada Juli 2025 terkait kesediaan mereka untuk memulai perundingan damai dengan pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.[74] Pemerintahan Prabowo–Gibran juga tidak menunjukkan indikasi untuk mempertimbangkan terobosan-terobosan kebijakan, seperti pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, dan pendirian Pengadilan HAM di Tanah Papua.

Alih-alih merespon desakan–desakan tersebut secara langsung, Presiden Prabowo pada bulan Juli menugaskan Wakil Presiden Gibran untuk memimpin proses percepatan pembangunan di Papua didasarkan pada Pasal 68A UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.[75] Dalam posisinya tersebut, Gibran nantinya tak hanya bertugas menangani pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan turut membawahi urusan soal HAM di Papua melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden kemudian membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin Velix Wanggai untuk membantu kerja Wakil Presiden Gibran pada bulan Oktober.[76] Komite ini ditugaskan untuk mengawal delapan agenda besar yang termuat dalam Asta Cita kontekstual Papua.[77] Tugas itu meliputi pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan, serta mengurus berbagai aspek sosial budaya, mulai dari urusan olahraga, kesetaraan gender, serta ekonomi kreatif yang bertujuan untuk pembangunan Papua. Komite juga akan berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Papua.

---


[73] "Jaringan Damai Papua Desak Presiden Prabowo Segera Buka Dialog Papua–Jakarta," *Tualnews.com*, September 2025, <https://www.tualnews.com/2025/09/jaringan-damai-papua-desak-presiden-prabowo-segera-buka-dialog-papua-jakarta/>

[74] Fidelis Batalinus, "Usai 63 Tahun Gerilya, OPM Tawarkan Dialog Damai kepada Presiden Prabowo," *Garuda TV*, 12 Juli 2025, <https://garuda.tv/usai-63-tahun-gerilya-opm-tawarkan-dialog-damai-kepada-presiden-prabowo/>

[75] "Yusril soal Tugas Khusus Gibran: Wapres Tak Berkantor di Papua," *CNN Indonesia*, 9 Juli 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250709075152-32-1248513/yusril-soal-tugas-khusus-gibran-wapres-tak-berkantor-di-papua>.

[76] Eva Safitri, "Istana: Komite Eksekutif Dibentuk Bantu Gibran di Badan Percepatan Otsus Papua," *detiknews*, 8 Oktober 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8151647/istana-komite-eksekutif-dibentuk-bantu-gibran-di-badan-percepatan-otsus-papua>.

[77] Novali Panji Nugroho, "Apa Tugas Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang Baru Dibentuk Prabowo," *TEMPO*, 9 Oktober 2025, <https://www.tempo.co/politik/apa-tugas-komite-eksekutif-percepatan-pembangunan-papua-yang-baru-dibentuk-prabowo--2077749>



Tak mengherankan jika kemudian banyak yang skeptis terhadap lembaga baru tersebut. Pilihan Presiden Prabowo untuk membangun “sekat” tambahan yang makin memisahkannya dari kebutuhan untuk merespon langsung aspirasi OAP menunjukkan keengganannya untuk keluar dari koridor kebijakan yang diwarisinya dari pemerintahan Jokowi. Presiden Prabowo seharusnya paham bahwa konflik bersenjata dan kekerasan di Papua tak bisa diselesaikan hanya melalui rekayasa birokrasi dan pendekatan teknokrasi kebijakan.

### 3 Reformasi Sektor Hukum

#### Signifikansi

Reformasi hukum adalah pekerjaan rumah yang tak pernah selesai di Indonesia pasca Reformasi. Upaya untuk membangun sistem hukum yang bersih dan berintegritas serta memastikan proses pembuatan perundangan yang transparan dan akuntabel terhadap publik justru menghadapi tantangan baru dalam sepuluh tahun terakhir ini. Perubahan budaya hukum yang secara gradual terjadi belum cukup kuat untuk menahan arus balik politik yang ingin kembali melemahkan institusi peradilan.[78]

Pada 2023, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Moh. Mahfud MD, membentuk *Tim Percepatan Reformasi Hukum* melalui Surat Keputusan No. 63 Tahun 2023 untuk membenahi kekacauan hukum yang menahun di Indonesia dengan empat agenda prioritas—reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, pencegahan serta pemberantasan korupsi, dan pembenahan sistem peraturan perundang-undangan.[79] Tim tersebut merampungkan 55 rekomendasi dan peta jalan implementasi untuk memperbaiki sistem hukum nasional kepada Presiden Jokowi dengan pesan tegas bahwa karut-marut hukum Indonesia tak bisa dibiarkan dan perlu dibenahi secara menyeluruh.[80]

#### Status



##### 1. MACET

Tidak ada inisiatif nyata, atau langkah yang diambil keliru sehingga tak ada perubahan atau keadaan justru memburuk.

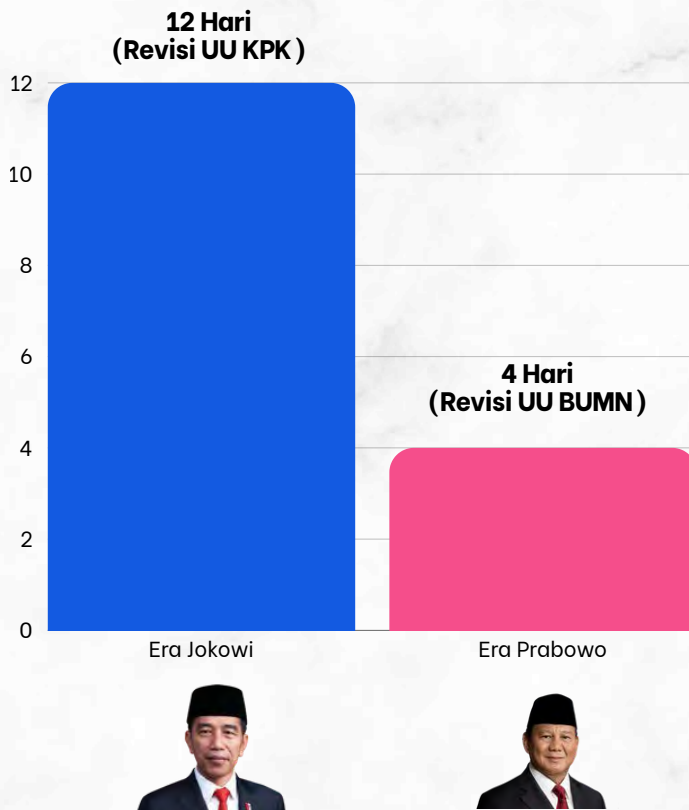
[78] "Jalan Terjal Reformasi Hukum: Antara Kemajuan Etika dan Tantangan Institusi," *HukumOnline.com*, 6 Agustus 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jalan-terjal-reformasi-hukum--antara-kemajuan-etika-dan-tantangan-institusi-it68934a942f9b3/?page=2>

[79] "Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum: Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum," *Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*, September 2023, [https://reformasihukum.kemitraan.or.id/wp-content/uploads/2023/09/Laporan-Final-Tim-Percepatan-Reformasi\\_-14-September-2023\\_1-spasi.pdf](https://reformasihukum.kemitraan.or.id/wp-content/uploads/2023/09/Laporan-Final-Tim-Percepatan-Reformasi_-14-September-2023_1-spasi.pdf)

[80] Dian Dewi Purnamasari, "55 Rekomendasi Tim Reformasi Hukum Diajukan ke Presiden," *Kompas.id*, 22 Agustus 2023, <https://www.kompas.id/artikel/rekomendasi-tim-reformasi-hukum-diserahkan-ke-presiden-september>

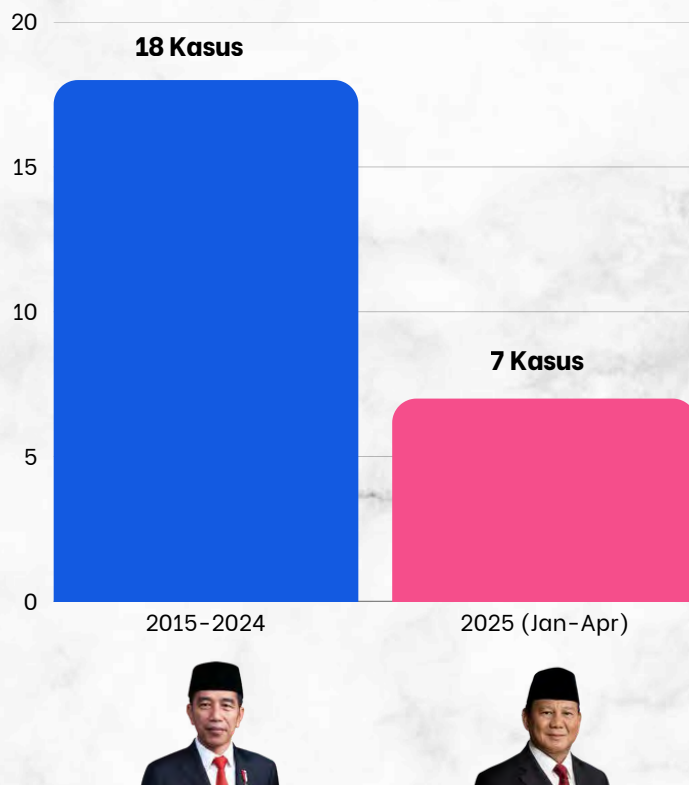
## Statistik Kunci

**Grafik 12. Waktu Tercepat dalam Mengesahkan UU**



Waktu pembahasan UU di era Prabowo lebih singkat, mencerminkan proses legislasi yang kian tertutup dan tidak partisipatif.

**Grafik 13. Kasus Suap yang Melibatkan Hakim**



Di era Jokowi, rata-rata ada dua hakim terlibat kasus suap dalam satu tahun. Di era Prabowo, belum ada satu tahun, sudah tujuh hakim terjerat kasus tersebut.

**Grafik 14. Anggaran DPR RI Sebagai Lembaga Pembentuk UU**



### ***Perjalanan di masa Presiden Joko Widodo***

- **Di era Jokowi, partisipasi publik dalam proses legislasi dikediri.** Padahal, pembuatan UU harusnya melibatkan publik secara bermakna sebagai wujud demokrasi substantif, mencegah lahirnya legislasi bermasalah, dan melindungi kelompok rentan dari dampak kebijakan. Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagai contoh, menekankan pentingnya asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara dalam jaringan dan/atau luar jaringan. [81] Partisipasi publik ini kemudian lebih jauh diatur dalam Pasal 96 UU 13/2022 beserta aturan turunannya. Namun, praktik yang terjadi justru berseberangan karena ruang partisipasi itu terus menyempit.[82] Sejak awal masa pemerintahan Jokowi, masyarakat sipil sudah mengeluhkan sulitnya memberi masukan dalam proses legislasi. Hal ini diperparah dengan waktu pembahasan yang sangat singkat, seperti yang terjadi pada pembahasan RUU KPK, RUU Minerba, UU IKN, dan RUU Cipta Kerja.

[81] Muhammad Raihan Nugraha, "Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi dalam Pembentukan UU," *HukumOnline.com*, 19 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu-lt5fa11a34d604b/>

[82] Ady Thea DA, "3 Peran Penting Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi," *Hukumonline*, 30 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-peran-penting-partisipasi-publik-dalam-proses-legislasi-lt66a8509c12e8d/>

- KPK, yang merupakan buah paling berharga dari Reformasi 1998, kehilangan independensinya pada era Jokowi.** DPR mengesahkan revisi UU KPK pada 17 September 2019, hanya dalam waktu dua minggu pembahasan, di tengah gelombang penolakan publik.[83] Revisi tersebut mengubah secara fundamental posisi KPK: lembaga ini kini berada di bawah Presiden, memiliki Dewan Pengawas yang dipilih pemerintah, dan para penyidiknyanya diubah statusnya menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sejak saat itu, KPK tak lagi berdiri sebagai lembaga independen, tetapi bagian dari eksekutif yang bisa dikendalikan.[84] Pelemahan ini tak lepas dari peran Jokowi.[85] Ia menilai KPK “terlalu kuat” dan menghambat pembangunan, bahkan disebut pernah meminta penghentian penyelidikan kasus *e-KTP* yang melibatkan Setya Novanto—karena khawatir mengganggu upaya koalisi politik dengan Golkar. Logika pembangunan ala Jokowi menempatkan stabilitas politik di atas integritas hukum—seolah korupsi bisa dimaafkan selama proyek berjalan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pelemahan KPK bukan semata hasil revisi undang-undang, tapi bagian dari sikap pemerintahan Jokowi yang mengutamakan stabilitas politik dan pembangunan di atas integritas hukum
- Independensi Mahkamah Konstitusi (MK) digadaikan demi kepentingan politik.** Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka jadi calon wakil presiden menandai runtuhnya integritas lembaga penjaga konstitusi. Saat itu usia Gibran masih 36 tahun—belum memenuhi syarat usia calon presiden dan wakil presiden, yaitu 40 tahun.[86] Indikasi konflik kepentingan tercium kuat dari proses pengambilan keputusan ini, mengingat Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK, merupakan paman Gibran. Ia menikah dengan Idayati, adik Jokowi, pada 25 Mei 2022, namun enggan mundur meski banyak pihak mendesaknya. Ini bukan kali pertama Jokowi berupaya melemahkan MK. Pada tahun 2022, DPR mencopot Hakim Konstitusi Aswanto hanya karena sering membatalkan produk undang-undang parlemen, termasuk UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.[87] Mantan Hakim MK I Dewa Gede Palguna mengatakan bahwa *“Pemberhentian Aswanto ini merupakan bentuk serangan terhadap MK dan kemandirian kekuasaan kehakiman,”*.[88]

[83] Laila Afifa, “Jokowi’s Role in the Weakening of KPK,” *TEMPO English*, 23 Desember 2023,

<https://en.tempo.co/read/1813010/jokowis-role-in-the-weakening-of-kpk>

[84] Ahmad Faiz, “Pelemahan Pemberantasan Korupsi Lewat Revisi UU KPK,” *TEMPO*, 28 Juli 2024,

<https://www.tempo.co/arsip/dampak-revisi-uu-kpk-24921>

[85] Afifa, “Jokowi’s Role in the Weakening of KPK,” 2023.

[86] Hussein Abri, “Simsalabim Jadi Undang-undang,” *TEMPO*, 28 Juli 2024, <https://www.tempo.co/arsip/pelemahan-pengawas-pemerintah-24756>

[87] “Pemberhentian hakim MK Aswanto, Istana isyaratkan abaikan DPR ‘Posisi presiden jelas tunduk pada konstitusi,” *BBC News Indonesia*, 5 Oktober 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrzgm2813xo>

[88] Ady Thea DA, “Mantan Hakim Konstitusi: Pencopotan Aswanto Serangan Terhadap Kemandirian MK,” *HukumOnline.com*, 9 November 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi--pencopotan-aswanto-serangan-terhadap-kemandirian-mk-lt636b395c8bb1a/>

Serangan berikutnya datang lewat revisi UU MK tahun 2024, yang mewajibkan hakim konstitusi memperoleh restu lembaga pengusul untuk memperpanjang masa jabatan. Aturan ini membuka peluang intervensi politik yang semakin besar. MK yang semestinya menjadi penjaga konstitusi kini justru berubah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan—menyisakan demokrasi tanpa penyeimbang.

- **KUHP baru menandai kemunduran demokrasi di era Jokowi.** DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pada 6 Desember 2022, hanya sebulan setelah draf akhirnya diserahkan. [89] Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai, proses yang terburu-buru ini meloloskan banyak pasal bermasalah yang bertentangan dengan semangat demokrasi, berpotensi melanggengkan korupsi, serta terlalu jauh mengatur urusan pribadi warga negara.[90] Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, misalnya, mengancam pelaku dengan hukuman penjara hingga tiga tahun. Sementara pasal 256 mengatur ancaman pidana atau denda bagi penyelenggara demonstrasi yang tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Pasal ini menunjukkan upaya pembatasan terhadap kebebasan sipil—menempatkan kebebasan berpendapat dalam posisi yang rentan karena bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.[91] Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia bahkan turut menyoroti KUHP baru karena bertentangan dengan prinsip HAM—dari kriminalisasi jurnalis, pembatasan hak aborsi, hingga diskriminasi terhadap kelompok minoritas.[92] Namun kritik itu diabaikan. Pemerintah tetap melangkah, menegaskan arah kekuasaan yang makin menutup ruang bagi demokrasi. Singkatnya, KUHP baru ini berpotensi akan mengulangi pola kekuasaan otoriter seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

[89] Stefanus Pramono, "Orde Baru KUHP," *TEMPO*, 13 Desember 2022, <http://tempo.co/newsletter/orde-baru-kuhp-240118>

[90] Hussein Abri Dongoran, Raymundus Rikang, dan Syalsabilla, "Pecah Bisul Begawan Hukum," *TEMPO*, 11 Desember 2022, <https://www.tempo.co/arsip/rkuhp-disahkan-siapa-penyokongnya-829302>

[91] Willa Wahyuni, "Melihat Kembali Sederet Pasal Kontroversial KUHP Baru," *HukumOnline*, 20 Januari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-sederet-pasal-kontroversial-kuhp-baru-lt63ca672b7dc8d/>

[92] Avit Hidayat, "Bergeming terhadap Kritik Internasional," *TEMPO*, 13 Desember 2022, <https://www.tempo.co/politik/bagaimana-respons-pegiat-setelah-kemenlu-memanggil-pbb-karena-mengkritik-rkuhp-830048>



- **DPR kehilangan fungsi pengawasan dan berubah jadi perpanjangan tangan kekuasaan.** Di era Jokowi, hampir semua rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah lolos tanpa perdebatan berarti. Pembahasan yang kilat dan minim kritik menjadikan DPR sekadar tukang stempel kebijakan eksekutif. Kondisi ini dimungkinkan karena Jokowi sejak awal menancapkan pengaruh politiknya di parlemen dengan cara memanfaatkan dualisme kepemimpinan di partai-partai besar.[93] Di Partai Golkar, misalnya, Jokowi ikut mengintervensi perebutan kursi ketua umum antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono dengan mendukung kubu Agung melalui pengesahan Kemenkumham pada 2015. Konflik itu berakhir dengan naiknya Setya Novanto—tokoh yang dekat dengan Jokowi—sebagai ketua umum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016. Ia kemudian digantikan Airlangga Hartarto, pilihan Jokowi berikutnya, yang naik ke pucuk pimpinan partai setelah Setya lengser karena terjerat kasus korupsi *e-KTP*. Pola serupa terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ketika kubu Muhammad Romahurmuziy (Romy) yang didukung pemerintah akhirnya memenangkan kepemimpinan atas Suryadharma Ali, yang terjerat kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010–2013, dan membawa PPP bergabung ke koalisi pemerintah.

Dengan cara ini, Jokowi berhasil mengonsolidasikan hampir semua partai politik oposisi di parlemen.[94] Di periode kedua, ia bahkan menampung mantan lawannya, Prabowo, yang merupakan lawan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019, sebagai Menteri Pertahanan.[95] Hasilnya, oposisi di DPR nyaris tak punya daya: PKS berdiri sendirian, Demokrat tak konsisten, dan PAN sibuk dengan konflik internal. Jokowi pun pernah memberikan pernyataan bahwa dalam politik Indonesia, oposisi memang tak ada. *“Kita ini ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi kayak di negara lain. Demokrasi kita ini adalah demokrasi gotong royong.”*[96]

[93] Abri, “Simsalabim Jadi Undang-undang,” 2024.

[94] Abri, “Simsalabim Jadi Undang-undang,” 2024.

[95] “Jokowi angkat Prabowo jadi Menhan: Dari musuh ke koalisi, langkah yang menjadi ‘hari gelap’ HAM dan ‘turunkan’ nilai demokrasi,” *BBC News Indonesia*, 23 Oktober 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50136052>

[96] Mahisa Cempaka, “Lewat Politik Merangkul Lawan, Tak Ada Lagi Oposisi Sejati di Era Jokowi,” *Vice*, 23 Desember 2020, <https://www.vice.com/id/article/motif-jokowi-rangkul-sandiaga-uno-dan-prabowo-masuk-kabinet-tak-ada-oposisi-di-indonesia/>



Image: AntaraFoto

### ***Tempuhan di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran***

Pada 6 November 2024, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Langkah ini diambil agar tidak ada regulasi yang saling bertabrakan atau bertentangan satu sama lain.[97] Peninjauan ulang tersebut menjadi langkah penting, bukan hanya untuk menghapus produk hukum bermasalah dari era Jokowi, tetapi juga untuk memulihkan hak-hak konstitusional warga negara yang sempat terampas oleh peraturan yang cacat sejak awal. Ahli hukum tata negara Feri Amsari menilai inisiatif tersebut penting dan sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik. Menurutnya, seorang presiden harus berani menelusuri dan memperbaiki undang-undang bermasalah yang diwariskan pemerintahan sebelumnya. *"Presiden baru yang baik adalah memastikan dia punya sikap berbeda dibandingkan presiden lama yang dianggap memiliki catatan buruk. Terutama khusus Jokowi ya, pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat buruk. Perlu ada upaya menelusuri undang-undang yang bermasalah itu dengan bijaksana,"* ujar Feri.

[97] Muhammad Radityo Priyasmono, "Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?" *Liputan 6*, 7 November 2024, <https://www.liputan6.com/news/read/5774208/prabowo-tinjau-ulang-seluruh-undang-undang-hingga-perpres-apa-prioritasnya?page=2>

Sayangnya, kembali panggang jauh dari api. Reformasi sektor hukum tinggal menjadi retorika di tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran Alih-alih menegakkan prinsip transparansi dan partisipasi publik, pemerintahan baru ini justru mengulang praktik legislasi kilat yang gemar dilakukan pendahulunya. Proses pembuatan undang-undang (UU) yang tertutup, terburu-buru, dan minim pengawasan publik kembali terjadi—menandai betapa cepat komitmen pada reformasi hukum terkikis pada tahun pertama kekuasaan. Contohnya adalah revisi UU Tentara Nasional Indonesia (TNI), revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan revisi UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN). [98]

Revisi UU TNI, yang awalnya tak termasuk dalam Prolegnas Prioritas 2025, disahkan pada 20 Maret 2025—hanya sebulan setelah Surat Presiden terbit pada Februari 2025. Pembahasan RUU ini dilakukan secara tertutup di hotel mewah pada pertengahan Maret 2025, sembunyi dari pengawasan masyarakat sipil.[99] *"Pembahasan tertutup tersebut menunjukkan rendahnya komitmen transparansi. Draf RUU juga bermasalah karena memuat perluasan jabatan sipil yang diduduki oleh prajurit TNI aktif,"* ujar Muhammad Isnur, Ketua YLBHI.

Pola serupa juga tampak pada revisi UU BUMN yang menjadi dasar hukum pembentukan Danantara selaku badan pengelola investasi nasional.[100] Pembahasan dimulai pada 25 November 2024 dan disahkan hanya tiga bulan kemudian, pada hari yang sama dengan peluncuran Danantara. Tak lama, UU ini direvisi lagi secara ekspres—hanya sembilan hari pembahasan.[101] *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menilai revisi tersebut cacat formil dan inkonstitusional. Berbagai kelompok masyarakat pun menggugat revisi UU BUMN ke Mahkamah Konstitusi.

Pola ini, sayangnya, masih berlanjut pada revisi KUHAP, yang seharusnya menjadi tonggak pembaruan hukum acara pidana agar lebih menghormati HAM.[102] Namun, alih-alih menghadirkan keadilan yang berpihak pada warga, prosesnya justru kembali dilakukan secara terburu-buru dan tertutup. Komisi III DPR dan pemerintah menyelesaikan pembahasan Daftar Isian Masalah (DIM) yang memuat 1.676 poin hanya dalam dua hari, meski sebelumnya menjanjikan proses yang transparan dan partisipatif.[103]

[98] Erobby Jawi Fahmi, "Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, YLBHI: Kacaunya Pembentukan Produk Hukum," *aktual.com*, 20 Oktober 2025, <https://aktual.com/satu-tahun-pemerintahan-prabowo-ylbhi-kacaunya-pembentukan-produk-hukum/>

[99] Erobby Jawi Fahmi, "Satu Tahun Pemerintahan Prabowo," 20 Oktober 2025.

[100] Daya Agata Nusantara diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. Tak hanya sebagai badan pengelola investasi, Danantara juga diposisikan sebagai lembaga super holding dengan skala wewenang dan total aset terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Lihat di Permata Adinda, "Dari Danantara untuk PSN: Mainan Baru Taipan Perusak Lingkungan di Lingkar Kekuasaan," *Project Multatuli*, 14 Oktober 2025, <https://projectmultatuli.org/dari-danantara-untuk-psn-mainan-baru-taipan-perusak-lingkungan-di-lingkar-kekuasaan/>

[101] Permata Adinda, "Dari Danantara untuk PSN," 14 Oktober 2025.

[102] Bugivia Maharani Setiadji Putri, "Revisi KUHAP: Kuasa Polisi makin besar, warga makin terpojok?" *The Conversation*, 28 Juli 2025, <https://theconversation.com/revisi-kuhap-kuasa-polisi-makin-besar-warga-makin-terpojok-261882>

[103] Rachel Narda Chaterine dan Nawir Rasyad Akbar, "Komisi III Lanjutkan Pembahasan RUU KUHAP Pada Masa Sidang Mendatang," *Kompas.com*, 22 September 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/22/12561321/komisi-iii-lanjutkan-pembahasan-ruu-kuhap-pada-masa-sidang-mendatang>

Selain prosesnya yang karut-marut, substansi revisi KUHP juga mengandung berbagai permasalahan. Koalisi Masyarakat Sipil menilai draf revisi KUHP justru berpotensi memperkuat kewenangan aparat penegak hukum tanpa kontrol yang memadai, membuka peluang penyalahgunaan wewenang, penyiksaan, dan kriminalisasi, serta melemahkan peran advokat dan hak tersangka.[104] YLBHI mencatat dari 2019–2025 terdapat 154 kasus kriminalisasi dengan 1.097 korban akibat sistem penyidikan yang buruk, dan RKUHP yang ada belum menjawab masalah-masalah tersebut secara serius.

Persoalan legislasi tak berhenti pada praktik pembentukan undang-undang yang serampangan. DPR dan pemerintah juga gagal memprioritaskan rancangan yang melindungi kelompok rentan. Dalam perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2025, DPR menyetujui 52 RUU, dari RUU Perampasan Aset hingga RUU Polri.[105] Namun, dua rancangan yang paling dibutuhkan masyarakat justru terus diabaikan: RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).[106]

RUU Masyarakat Adat, yang sudah 15 tahun terkatung-katung, seharusnya menjadi pilar pelaksanaan Asta Cita 2 tentang memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.[107] Tanpa keberadaan masyarakat adat yang menjaga sumber pangan lokal, menyerap emisi karbon, dan melindungi habitat satwa liar, agenda prioritas ini akan sulit terwujud. Berbagai studi mengungkap bahwa sistem pangan lokal yang dikembangkan masyarakat adat terbukti adaptif terhadap perubahan iklim dan tahan terhadap hama.[108] Namun hingga kini, mereka terus menjadi korban ekspansi industri dan kebijakan negara yang mengabaikan hak ulayat. Data AMAN menunjukkan 687 konflik agraria di wilayah adat dalam sepuluh tahun terakhir, mencakup lebih dari 11 juta hektare lahan dan menjerat 925 warga adat dalam kriminalisasi.[109]

---

[104] "Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi KUHP Meminta DPR Kembali Membuka Pembahasan RKUHP secara Substansi, tidak Tergesa-gesa dan Melakukan Partisipasi Publik yang 'Bermakna'," *Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil*, 22 Juli 2025, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/koalisi-masyarakat-sipil-untuk-reformasi-kuhp-meminta-dpr-kembali-membuka-pembahasan-rkuhp-secara-substansi-tidak-tergesa-gesa-dan-melakukan-partisipasi-publik-yang-bermakna/>

[105] Novianti Setuningsih dan Tria Sutrisna, "Daftar 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025, RUU Perampasan Aset hingga RUU Polri," *Kompas.com*, 23 September 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/23/15253421/daftar-52-ruu-prolegnas-prioritas-2025-ruu-perampasan-aset-hingga-ruu-polri>

[106] Rini Mardika, "Ironi RUU Masyarakat Adat dan RUU PRT: Puluhan Tahun Digantung DPR," *Merdika*, 24 Maret 2025, <https://merdika.id/ironi-ruu-masyarakat-adat-dan-ruu-pprt-puluhan-tahun-digantung-dpr/>

[107] Willa Wahyuni, "Peran Krusial Hukum Adat dalam RPJPN dan Asta Cita," *HukumOnline*, 18 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-krusial-hukum-adat-dalam-rpjpn-dan-asta-cita-lt67b46d4d8d1e7/?page=2>

[108] Pradipta Pandu Mustika, "Pengakuan terhadap Wilayah dan Hak Masyarakat Adat Simbol Perwujudan Asta Cita," *Kompas.id*, 10 Agustus 2025, <https://www.kompas.id/artikel/pengakuan-terhadap-wilayah-dan-hak-masyarakat-adat-simbol-perwujudan-asta-cita>

[109] "Presiden Prabowo Didesak Sahkan RUU Masyarakat Adat di 100 Hari Kerja," *Law-Justice*, 21 Oktober 2024, <https://www.law-justice.co/artikel/176123/presiden-prabowo-didesak-sahkan-ruu-masyarakat-adat-di-100-hari-kerja/>



Image: AntaraFoto

Nasib serupa menimpa RUU Perlindungan PRT, yang terkatung-katung dua dekade sejak pertama kali diajukan pada 2004. Selama penantian itu, kasus kekerasan terhadap PRT terus terjadi—dari penyiksaan fisik hingga eksploitasi ekonomi. Data Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyebutkan, jumlah PRT di Indonesia mencapai 5 juta jiwa. Tanpa payung hukum yang jelas, mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.[110] Padahal, RUU ini berkaitan langsung dengan Asta Cita tentang peningkatan sumber daya manusia (SDM).[111] Dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai, RUU ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup jutaan PRT di Indonesia, yang pada akhirnya turut mendukung peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan. Perlindungan terhadap hak-hak PRT, termasuk akses terhadap upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan dari kekerasan, merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Di tengah abainya proses legislasi negara terhadap kelompok rentan, tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran juga diwarnai oleh politisasi hukum yang semakin terang-terangan. Dua kasus pengampunan yang diberikan Presiden Prabowo kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa hukum masih menjadi alat politik, bukan instrumen keadilan.[112]

[110] Rini Mardika, "Ironi RUU Masyarakat Adat dan RUU PRT," 24 Maret 2025.

[111] Putri Dinda Permata Sari, "Komisi XIII DPR Kebut RUU Perlindungan PRT: Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo," *Akurat*, 30 Oktober 2024, <https://www.akurat.co/nasional/1305256057/komisi-xiii-dpr-kebut-ruu-perlindungan-prt-sejalan-dengan-asta-cita-presiden-prabowo>

[112] Ani Purwanti dan Alexander Seran, "Diskursus Publik dan Narasi Media Sosial: Perspektif Otto Kircheimer tentang Politisasi Hukum," *Journal of Mandalika Literature*, 6, No. 1, 2024, <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/download/3978/3096/>

Kasus Tom Lembong bermula dari dugaan korupsi impor gula kristal mentah (GKM) yang disidik Kejaksaan Agung sejak 2023. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada Oktober 2024 dan divonis bersalah pada Maret 2025 karena kebijakan impornya dianggap merugikan negara hingga Rp578 miliar.[113] Tom membantah tuduhan itu dan menyebut keputusan impor diambil atas perintah Presiden Jokowi kala itu. Namun, setelah menjalani proses hukum, Prabowo memberikan abolisi yang menghapus seluruh tuntutan. Terlepas dari dugaan kuat kasus Tom bersifat politis, pemberian abolisi oleh Prabowo menimbulkan dugaan bahwa langkah itu lebih bernuansa politis daripada yuridis.[114]

Polanya serupa pada Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP yang divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap terkait Harun Masiku.[115] Tak lama setelahnya, ia mendapat amnesti dari Presiden. Beberapa hari kemudian, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kadernya untuk mendukung pemerintah—menguatkan kesan bahwa pengampunan tersebut merupakan bagian dari kalkulasi politik, bukan kebijakan hukum yang objektif.[116] Langkah tersebut memperkuat kesan bahwa pengampunan terhadap Hasto bukanlah keputusan hukum yang netral, melainkan bagian dari manuver politik untuk merangkul PDIP—satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan, meski enggan menyebut diri sebagai oposisi.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa langkah Prabowo ini berpotensi merusak fondasi pemberantasan korupsi di Indonesia.[117] *"Dampak jangka panjangnya itu yang berbahaya sekali bagi pemberantasan korupsi. Pengampunan-pengampunan ini bisa terus diberikan tergantung dari relasi politik terpidana, bisa karena kedekatan personal, bisa juga karena hal-hal yang sifatnya sangat politik seperti yang dilakukan terhadap Hasto,"* kata Bivitri.

Kebijakan ini juga bertentangan dengan semangat Asta Cita 7, yang menegaskan komitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.[118] Alih-alih menunjukkan pemerintahan yang bersih dan tegas terhadap pelanggaran hukum, Prabowo justru memperlihatkan bahwa kekuasaan masih berada di atas hukum—melanjutkan pola lama di mana keadilan tunduk pada kepentingan politik.

[113] Syakirun Ni'am dan Jessi Carina, "Kronologi Kasus Tom Lembong: Disidik Menjelang Pilpres, Dibebaskan Prabowo," *Kompas.com*, 1 Agustus 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/08130231/kronologi-kasus-tom-lembong-disidik-menjelang-pilpres-dibebaskan-prabowo?page=all>

[114] Satrio Alif Febriyanto, "Abolisi untuk Tom Lembong: Yudisialisasi Politik Berujung Politisasi Yudisial," *Republika*, 5 Agustus 2025, <https://republika.id/posts/58675/abolisi-untuk-tom-lembong-yudisialisasi-politik-berujung-politisasi-yudisial>

[115] Zunita Putri, "Jejak Hasto di Kasus Harun Masiku: Jadi Tersangkat, Diadili, Lalu Dapat Amnesti," *detiknews*, 1 Agustus 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8039946/jejak-hasto-di-kasus-harun-masiku-jadi-tersangkat-diadili-lalu-dapat-amnesti>

[116] "Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto bebas – Apa dampaknya bagi pemberantasan korupsi," *BBC News Indonesia*, 2 Agustus 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c14g0652xv4o>

[117] "Pakar: Pengampunan prabowo bentuk politisasi dan ancam sistem hukum," *CNN Indonesia*, 1 Agustus 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250801151515-12-1257662/pakar-pengampunan-prabowo-bentuk-politisasi-dan-ancam-sistem-hukum>

[118] Visi misi Prabowo-Gibran, 2023.

Situasi ini tidak berdiri sendiri. Politisasi hukum di era Prabowo–Gibran berjalan seiring dengan konsolidasi kekuasaan di parlemen yang semakin menutup ruang oposisi. Setelah dua dekade reformasi, DPR kembali berubah menjadi perpanjangan tangan eksekutif—bukan penyeimbangannya.

Sama seperti Jokowi, Prabowo melenggang dalam Pilpres 2024 dengan koalisi jumbo yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora, serta Prima—yang diberi nama Koalisi Indonesia Maju (KIM). Setelah menang, partai yang sebelumnya mendukung kandidat lain seperti PKB, PKS, dan NasDem merapat ke gerbong pemerintah, dan koalisi direvisi menjadi KIM Plus. Alhasil, KIM Plus menguasai 470 dari 580 kursi DPR, atau sekitar 80%. Sisanya, 110 kursi, dipegang PDI Perjuangan yang memilih berdiri di luar pemerintah, meskipun tidak menempatkan diri sebagai oposisi.[120] Dengan dominasi KIM Plus di parlemen, tak heran jika sejumlah regulasi yang dikritik publik tetap lolos di DPR.

Dominasi ini membuat hampir semua kebijakan pemerintah melenggang mulus di Senayan. Tak heran bila sejumlah regulasi yang ditentang publik tetap disahkan tanpa perdebatan berarti. Djayadi Hanan, pengajar ilmu politik di Universitas Islam Internasional Indonesia, menyebut pola ini sebagai bentuk kontrol kekuasaan. Pemerintah memastikan parlemen tidak menjadi penghambat, tapi mitra yang patuh.

Untuk melengkapi cengkeraman itu, Presiden Prabowo sempat menggulirkan gagasan pembentukan *presidential club*—forum berisi para mantan presiden era reformasi.[121] Ide yang tampak simbolis ini sesungguhnya punya muatan politik yang jelas: meredam potensi oposisi dari luar kekuasaan, terutama dari Megawati Soekarnoputri yang kini memimpin satu-satunya partai di luar pemerintahan. [122]

Dengan parlemen yang nyaris bulat mendukung pemerintah dan oposisi yang kehilangan arah, sistem politik Indonesia kembali bergerak ke arah yang mengkhawatirkan: demokrasi tanpa penyeimbang, di mana kekuasaan tak lagi punya lawan, hanya pengikut

---

[120] Faisal Irfani, "Bagaimana militer, pengusaha, dan partai politik menopang kekuasaan Prabowo Subianto," *BBC News Indonesia*, 20 Oktober 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn8x77vpx3wo>

[121] Viriya Singgih, "'Presidential Club' ala Prabowo dikhawatirkan jadi 'klub elite para sultan' – 'Kuncinya ada di Megawati'," *BBC News Indonesia*, 7 Mei 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckv7plzwwq7o>

[122] Ahmad Alfian, "Klub Presiden Ala Prabowo Dinilai Upaya Mematikan Oposisi," *RMOL.ID*, 6 Mei 2024, <https://rmol.id/politik/read/2024/05/06/619309/klub-presiden-ala-prabowo-dinilai-upaya-mematikan-oposisi>

## ***E. Menatap Tahun Kedua - Saatnya Beranjak dari Bayang-Bayang Jokowi***

Penguatan demokrasi di tahun pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan dengan tersendat. Analisis yang kami lakukan di tiga isu kunci menemukan banyaknya sumbatan dan beragam kemacetan. Alih-alih melakukan terobosan seperti yang dijanjikan dalam *Asta Cita*, pemerintahan Prabowo-Gibran memilih untuk melanjutkan praktik-praktik anomali demokrasi yang menjadi ciri utama pemerintahan sebelumnya. Presiden Prabowo seolah ingin ikut mengambil keuntungan dari kecenderungan negatif yang marak dalam sepuluh tahun terakhir. Akibatnya, dalam konteks penguatan demokrasi, tidak dijumpai langkah kebijakan yang signifikan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran untuk keluar dari trajektori kebijakan yang dikembangkan oleh Jokowi.

Warga juga tidak buta atas tempuhan yang padat tersendat tersebut. Walaupun berbagai survei kepuasan publik menunjukkan dukungan yang kuat pada pemerintah, gelombang protes massa serta demonstrasi jalanan menunjukkan bahwa jika tidak ada perubahan yang berarti mala gejalak akan terus terjadi. Menguatnya skeptisme warga terhadap efektivitas oposisi formal di DPR seharusnya menjadi lonceng pengingat (*alarm bell*) bagi Presiden Prabowo untuk membenahi kebijakan-kebijakan bagi penguatan demokrasi. Demokrasi yang santun hanya mungkin terjadi jika warga mempercayai kredibilitas saluran-saluran formal yang ada. Jika syarat perlu (*necessary condition*) tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, panggung jalanan akan menjadi pilihan yang kian tak terhindarkan.

Pemerintahan Prabowo-Gibran kemudian memiliki dua opsi pada tahun keduanya. Pilihan pertama adalah kian meninggalkan *Asta Cita* dan terus berdiam dalam kungkungan bayang-bayang gelap kebijakan Jokowi. Sebuah pilihan yang mudah dan mungkin akan memberikan keuntungan politik dalam jangka pendek namun akan memperparah kemunduran demokrasi yang telah terjadi sebelumnya. Pilihan kedua adalah kembali setia pada *Asta Cita*, melakukan terobosan dan perubahan untuk menciptakan trajektori baru bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Pilihan kedua pastinya lebih tidak mudah namun dapat dipastikan akan membawakan kemaslahatan yang lebih besar bagi seluruh warga. Keberlanjutan tidak berarti tunduk dalam bayang-bayang laknat hantu masa silam. Keberlanjutan adalah sebuah komitmen untuk melakukan koreksi untuk mewujudkan sesuatu yang lebih baik, lebih bermartabat dan lumintu.



Beberapa langkah cepat kemudian bisa diambil pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menciptakan momentum pada awal tahun kedua pemerintahan. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah:

1. **Melakukan reformasi menyeluruh terhadap polisi.** Rendahnya akuntabilitas serta tingginya impunitas adalah masalah utama yang menggerogoti kredibilitas Polri dan harus menjadi jantung reformasi kepolisian. Ini bisa dimulai dengan memastikan bahwa *Komite Reformasi Polisi* yang dibentuk oleh Presiden Prabowo diisi oleh individu-individu yang kompeten dan bisa bekerja secara efektif dengan dukungan politik serta kelembagaan yang kokoh. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus menunjukkan komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan, serta melakukan langkah-langkah strategis guna melakukan perombakan menyeluruh terhadap struktur dan pejabat kepolisian
2. **Menerapkan paradigma kebijakan politik ekonomi baru yang tidak bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam dan pendekatan keamanan di Papua.** Alih-alih mensejahterakan, ekstraksi masif sumber daya alam di Papua justru memicu konflik dan memperlebar kesenjangan.[122] Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah sepatutnya meninggalkan paradigma usang yang menggunakan kekerasan negara untuk melancarkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Menghentikan ekspansi operasi tempur/militer di Papua adalah langkah cepat yang bisa dilakukan dalam jangka pendek untuk mengawali pergeseran paradigma kebijakan tersebut. Penghentian operasi ini akan memberikan akses bagi organisasi kemanusiaan untuk menangani masalah pengungsi korban konflik di Papua serta mendorong penerapan kebijakan yang lebih komprehensif oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebentuk jeda kemanusiaan yang disepakati oleh semua pihak yang bersengketa diperlukan untuk menghentikan kekerasan dan mencegah bertambahnya korban jiwa, terutama warga sipil, serta membuka kembali pintu dialog bagi solusi politik damai di Papua.

[122] INDEF dan Greenpeace. *Otonomi Khusus dan Kutukan Sumber Daya Alam Papua*, Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2022), [https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2022/12/f8c43794-otonomi-khusus-dan-kutukan-sumber-daya-alam-papua\\_19122022.pdf](https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2022/12/f8c43794-otonomi-khusus-dan-kutukan-sumber-daya-alam-papua_19122022.pdf)

### **3. Melakukan pembenahan mendasar dalam reformasi hukum.**

Pemerintahan Prabowo–Gibran perlu mengakhiri tradisi politisasi hukum yang menempatkan keadilan di bawah kepentingan kekuasaan. Pemberian grasi, amnesti, atau abolisi harus dikembalikan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan, bukan menjadi alat transaksi politik. Jika presiden hendak menunjukkan arah baru, langkah paling simbolik dan substantif adalah membebaskan seluruh tahanan politik (tapol), termasuk tapol yang ditangkap pasca Agustus Kelabu dan tapol Papua—sebagai sinyal bahwa hukum tak lagi dipakai untuk membungkam kritik atau mengabadikan konflik. Tindakan segera lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan menghentikan dan mengkaji ulang revisi KUHP sepenuhnya. Proses revisi selama ini berlangsung tertutup, terburu-buru, dan sarat pasal bermasalah yang justru memperluas kewenangan aparat tanpa pengawasan publik. Pemerintah perlu memastikan reformasi hukum acara pidana berjalan dengan prinsip *due process of law* dan menjamin hak-hak warga, bukan melanggengkan praktik penyiksaan, kriminalisasi, dan impunitas. Tanpa perombakan menyeluruh yang menegaskan supremasi hukum di atas kepentingan politik, *Asta Cita* tentang penguatan hukum hanya akan tinggal jargon.

#### ***Presiden Prabowo, Anda bukanlah Joko Widodo.***

Berdiam dalam bayang-bayang tentulah nyaman, Namun anda dipilih dan dilantik tidak untuk bermain sandiwara. Saatnya Anda meretas arah kebijakan yang baru bagi Indonesia.



Image: Antara

## Catatan

Abdurrahman, Sultan. "Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun." *TEMPO*. 12 Juni 2024. <https://www.tempo.co/politik/komisi-iii-dpr-setujui-usulan-kenaikan-anggaran-polri-jadi-rp-165-31-triliun-50118>

Abri, Hussein. "Simsalabim Jadi Undang-undang." *TEMPO*. 28 Juli 2024. <https://www.tempo.co/arsip/pelemahan-pengawas-pemerintah-24756>

Adinda, Permata. "Dari Danantara untuk PSN: Mainan Baru Taipan Perusak Lingkungan di Lingkar Kekuasaan." *Project Multatuli*. 14 Oktober 2025. <https://projectmultatuli.org/dari-danantara-untuk-psn-mainan-baru-taipan-perusak-lingkungan-di-lingkar-kekuasaan/>

Afifa, Laila. "Jokowi's Role in the Weakening of KPK." *TEMPO English*. 23 Desember 2023. <https://en.tempo.co/read/1813010/jokowis-role-in-the-weakening-of-kpk>

AJI. "89 Kasus Serangan terhadap Pers Indonesia pada 2023, Tertinggi Dalam Satu Dekade." *Aliansi Jurnalis Independen (AJI)*. 13 Februari 2024. <https://aji.or.id/informasi/89-kasus-serangan-terhadap-pers-indonesia-pada-2023-tertinggi-dalam-satu-dekade>

Alfian, Ahmad. "Klub Presiden Ala Prabowo Dinilai Upaya Mematikan Oposisi." *RMOL.ID*. 6 Mei 2024. <https://rmol.id/politik/read/2024/05/06/619309/klub-presiden-ala-prabowo-dinilai-upaya-mematikan-oposisi>

Almughni, Rakli. "Pengamat Politik Sebut Prabowo Seharusnya Copot Kapolri Listyo Sigit pada 28 Agustus." *Tribunnews.com*. 7 September 2025. <https://m.tribunnews.com/nasional/7725187/pengamat-politik-sebut-prabowo-seharusnya-copot-kapolri-listyo-sigit-pada-28-agustus>

Amnesty International Indonesia. "Penambangan Blok Wabu akan 'berakibat bencana' di tengah represi terhadap OAP." *Amnesty.id*. 21 Maret 2022. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/penambangan-blok-wabu-akan-berakibat-bencana-di-tengah-represi-terhadap-oap/03/2022/>

Anggrainy, Firda Cynthia. "Kapolri Ungkap Anggaran Polri 2025 Rp 126,62 T: Kita Gunakan Optimal." *detiknews*. 11 November 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7632806/kapolri-ungkap-anggaran-polri-2025-rp-126-62-t-kita-gunakan-optimal>

Anggrainy, Firda Cynthia. "Polri Paparkan Pagu Anggaran 2024 Rp 114 Triliun ke Komisi III DPR." *detiknews*. 4 September 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6912956/polri-paparkan-pagu-anggaran-2024-rp-114-triliun-ke-komisi-iii-dpr>

Anugrahanto, Nino Citra, Iqbal Basyari, dan Nina Susilo. "Presiden Urung Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusakan Agustus, Komitmen Proses Hukum Dipertanyakan." *Kompas.id*. 17 September 2025, <https://www.kompas.id/artikel/presiden-urung-bentuk-tim-pencari-fakta-kerusakan-agustus-komitmen-proses-hukum-dipertanyakan>

Arini, Shafira Cendra. "Proyek Jalan Trans Papua Belum Beres, TNI Bakal Diterjunkan." *detikfinance*. 21 Juli 2025, <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-8022611/proyek-jalan-trans-papua-belum-beres-tni-bakal-diterjunkan>.

Aswara, Dani. "Lanjutkan Operasi Damai Cartenz di Papua Tahun Depan, Polri: Konsepnya Masih Penegakan Hukum." *TEMPO*. 12 Desember 2024. <https://www.tempo.co/hukum/lanjutkan-operasi-damai-cartenz-di-papua-tahun-depan-polri-konsepnya-masih-penegakan-hukum-1180498>

Aswara, Dani. "Pemerintah Lanjutkan Operasi Damai Cartenz di Tahun 2025." *TEMPO*. 11 Desember 2024. <https://www.tempo.co/hukum/pemerintah-lanjutkan-operasi-damai-cartenz-di-tahun-2025-1179887>

BBC Indonesia. "Dua dari tiga polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan divonis bebas, keluarga korban kecewa: 'Sudah banyak yang meninggal, kok malah bebas'." *BBC News Indonesia*. 16 Maret 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64287089>

BBC Indonesia. "Haris Azhar dan Fatia jadi tersangka pencemaran nama baik Luhut, 'siapa minta maaf asalkan Luhut memaparkan data tandingan hasil riset'." *BBC News Indonesia*. 22 Maret 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60824315>

BBC Indonesia. "Jokowi angkat Prabowo jadi Menhan: Dari musuh ke koalisi, langkah yang menjadi 'hari gelap' HAM dan 'turunkan' nilai demokrasi." *BBC News Indonesia*. 23 Oktober 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50136052>

BBC Indonesia. "Kematian dua mahasiswa di Kendari: Enam polisi Sulawesi Tenggara dikenai sanksi disiplin." *BBC News Indonesia*. 28 Oktober 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50204352>

BBC Indonesia. "Pemberhentian hakim MK Aswanto, Istana isyaratkan abaikan DPR 'Posisi presiden jelas tunduk pada konstitusi'." *BBC News Indonesia*. 5 Oktober 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrzgm2813xo>

BBC Indonesia. "Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto bebas – Apa dampaknya bagi pemberantasan korupsi." *BBC News Indonesia*. 2 Agustus 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c14g0652xv4o>

Betalia, Vonita. "ICW: Anggaran Fantastis Polri Belum Diimbangi Pelayanan yang Baik." *inilah.com*. 9 Juli 2023. <https://www.inilah.com/icw-anggaran-fantastis-polri-belum-diimbangi-pelayanan-yang-baik>

Bhawono, Aryo. "Merauke Menolak Babak Belur Karena Food Estate." *Betahita*. 17 Oktober 2024, <https://betahita.id/news/detail/10633/merauke-menolak-babak-belur-karena-food-estate.html?v=1729118191>

Briantika, Adi. "Aksi Reformasi Dikorupsi: 1.489 Orang Ditangkap, 380 Jadi Tersangka." *tirto.id*. 3 Oktober 2019. <https://tirto.id/aksi-reformasi-dikorupsi-1489-orang-ditangkap-380-jadi-tersangka-ejaY>

Cempaka, Mahisa. "Lewat Politik Merangkul Lawan, Tak Ada Lagi Oposisi Sejati di Era Jokowi." *Vice*. 23 Desember 2020. <https://www.vice.com/id/article/motif-jokowi-rangkul-sandiaga-uno-dan-prabowo-masuk-kabinet-tak-ada-oposisi-di-indonesia/>

Chaterine, Rachel Narda, dan Nawir Rasyad Akbar. "Komisi III Lanjutkan Pembahasan RUU KUHAP Pada Masa Sidang Mendatang." *Kompas.com*. 22 September 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/22/12561321/komisi-iii-lanjutkan-pembahasan-ruu-kuhap-pada-masa-sidang-mendatang>

CNN Indonesia. "Mengetahui Koops Habema Bentuk Panglima TNI yang Tembak 18 OPM." *CNNIndonesia.com*. 16 Mei 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250515191801-20-1229620/mengetahui-koops-habema-bentuk-panglima-tni-yang-tembak-18-opm>.

CNN Indonesia. "Daftar Regulasi Super Cepat Era Jokowi: UU KPK, Ciptaker, hingga IKN." *CNNIndonesia.com*. 19 Januari 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118181513-32-748248/daftar-regulasi-super-cepat-era-jokowi-uu-kpk-ciptaker-hingga-ikn>

CNN Indonesia. "Kenapa Orang Papua Menolak Otsus dan Pemekaran Wilayah DOB." *CNNIndonesia.com*. 11 Mei 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511092523-20-795332/kenapa-orang-papua-menolak-otsus-dan-pemekaran-wilayah-dob>

CNN Indonesia. "Pakar: Pengampunan prabowo bentuk politisasi dan ancaman sistem hukum." *CNNIndonesia.com*. 1 Agustus 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250801151515-12-1257662/pakar-pengampunan-prabowo-bentuk-politisasi-dan-ancaman-sistem-hukum>

Dongoran, Hussein Abri, Raymundus Rikang, dan Syalsabilla. "Pecah Bisul Begawan Hukum." *TEMPO*. 11 Desember 2022. <https://www.tempo.co/arsip/rkuhp-disahkan-siapa-penyokongnya-829302>

Ernowo, Pasha Yudha. "Komnas HAM: Konflik Bersenjata di Papua Memakan 61 Korban Jiwa Sepanjang 2024." *Info Publik*. 30 Desember 2024. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/895992/komnas-ham-konflik-bersenjata-di-papua-memakan-61-korban-jiwa-sepanjang-2024>

Estherina, Ilona. "Anggaran Polri Tahun Depan Melonjak Jadi Rp 145,6 Triliun, Untuk Apa Saja?" *TEMPO*. 29 Agustus 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/anggaran-polri-tahun-depan-melonjak-jadi-rp-145-6-triliun-untuk-apa-saja--2064356>

Fahmi, Eroby Jawi. "Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, YLBHI: Kacaunya Pembentukan Produk Hukum." *aktual.com*. 20 Oktober 2025. <https://aktual.com/satu-tahun-pemerintahan-prabowo-ylbhi-kacaunya-pembentukan-produk-hukum/>

Faiz, Ahmad. "Pelemahan Pemberantasan Korupsi Lewat Revisi UU KPK." *TEMPO*. 28 Juli 2024. <https://www.tempo.co/arsip/dampak-revisi-uu-kpk-24921>

Fathurohman, Irfan. "Beda Nama Sama Rasa: Satgas Nemangkawi Berganti Damai Cartenz." *IDN Times*. 31 Januari 2022. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/beda-nama-sama-rasa-satgas-nemangkawi-berganti-damai-cartenz-00-vdzm7-3xp3ld>

Faturahman, Andi Adam. "Mengapa Aktivis semakin Terintimidasi pada Pemerintahan Prabowo-Gibran." *TEMPO*. 21 Oktober 2025. <https://www.tempo.co/politik/mengapa-aktivis-semakin-terintimidasi-pada-pemerintahan-prabowo-gibran-2081784>

Febriyanto, Satrio Alif. "Abolisi untuk Tom Lembong: Yudisialisasi Politik Berujung Politisasi Yudisial." *Republika*. 5 Agustus 2025. <https://republika.id/posts/58675/abolisi-untuk-tom-lembong-yudisialisasi-politik-berujung-politisasi-yudisial>

Firmansyah, Fery. "Beban Anggaran Anggota Dewan." *TEMPO*. 27 Agustus 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/beban-anggaran-anggota-dpr-2063515>

Fiveable. "Approval Ratings – AP US Government." *Fiveable*. Diakses pada 21 Oktober 2025. <https://fiveable.me/key-terms/ap-gov/approval-ratings>.

Fossati, Diego, dan Ferran Martinez i Coma. "How popular conceptions of democracy shape democratic support in Indonesia." *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* Disunting oleh Thomas Power and Eve Warburton. Singapura: ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2020.

Girsang, Vedro Imanuel. "Ancaman Kekerasan di Balik Aturan Penanganan Demonstrasi." *TEMPO*. 2 Oktober 2025. <https://www.tempo.co/hukum/panduan-penanganan-demonstran-anarkistis-2075371>

Girsang, Vedro Imanuel. "Jumlah Tersangka Demo Agustus Hampir Seribu." *TEMPO*. 27 September 2025. <https://www.tempo.co/hukum/jumlah-tersangka-demo-agustus-hampir-seribu-2073825>

Halim, Fikri dan Mohammad Yudha Prasetya. "10 Tahun Memimpin, Jokowi Bangun Ribuan Kilometer Jalan di Papua." *VIVA*. 5 Oktober 2024. <https://www.viva.co.id/bisnis/1758227-10-tahun-memimpin-jokowi-bangun-ribuan-kilometer-jalan-di-papua>

Hernawan, Budi. "Operasi Militer di Papua dan Insurgensi TPNPB adalah Konflik Bersenjata Non-Internasional." *Project Multatuli*. 31 Agustus 2025. <https://projectmultatuli.org/operasi-militer-di-papua-dan-insurgensi-tpnpb-adalah-konflik-bersenjata-non-internasional/>

Hidayat, Avit. "Bergeming terhadap Kritik Internasional." *TEMPO*. 13 Desember 2022. <https://www.tempo.co/politik/bagaimana-respons-pegiat-setelah-kemenlu-memanggil-pbb-karena-mengkritik-rkuhp-830048>

Human Rights Monitor. "Annual Report 2024: Human Rights and Conflict in West Papua." *Human Rights Monitor*. 20 Februari 2025. <https://humanrightsmonitor.org/reports/annual-report-2024-human-rights-and-conflict-in-west-papua/#:~:text=The%20armed%20conflict%20in%20West%20Papua%20throughout%202024,torture%20by%20security%20forces%2C%20particularly%20in%20the%20highlands>

Human Rights Monitor. "Update Pengungsi Internal Agustus'25: Krisis kemanusiaan di tengah operasi militer yang berlangsung." *Human Rights Monitor*. 22 Agustus 2025. <https://humanrightsmonitor.org/id/laporan/update-pengungsi-internal-agustus25-krisis-kemanusiaan-di-tengah-operasi-militer-yang-berlangsung/>

ICW. "100 Triliun untuk Kekerasan: Anggaran Polri dan Demokrasi yang Tercekik." *Indonesias Corruption Watch (ICW)*. 4 September 2025. <https://antikorupsi.org/id/100-triliun-untuk-kekerasan-anggaran-polri-dan-demokrasi-yang-tercekik>

INDEF dan Greenpeace. *Otonomi Khusus dan Kutukan Sumber Daya Alam Papua*. Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2022. [https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2022/12/f8c43794-otonomi-khusus-dan-kutukan-sumber-daya-alam-papua\\_19122022.pdf](https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2022/12/f8c43794-otonomi-khusus-dan-kutukan-sumber-daya-alam-papua_19122022.pdf)

IPC. "Konsekuensi Tiga DOB Provinsi Papua terhadap Masyarakat Adat." *Indonesia Parliamentary Center*. 17 November 2022. <https://ipc.or.id/konsekuensi-tiga-dob-provinsi-papua-terhadap-masyarakat-adat/>

Irfani, Faisal. "Bagaimana militer, pengusaha, dan partai politik menopang kekuasaan Prabowo Subianto." *BBC News Indonesia*. 20 Oktober 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn8x77vpx3wo>

Irfani, Faisal. "Teka-teki orang hilang dalam demo Agustus dan dugaan teror aparat – 'Tolong bantu temukan anak saya'." *BBC News Indonesia*. 18 September 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj07my805lno>

Jaffrey, Sana dan Eve Warburton. "Prabowo's Indonesia: Inheriting Democracy at Dusk." *Carnegie Endowment for International Peace*. 22 Oktober 2024. <https://carnegieendowment.org/research/2024/10/prabowos-indonesia-inheriting-democracy-at-dusk?lang=en>

Jaffrey, Sana, dan Eve Warburton. "Jokowi's decade in Power." *The Jokowi's Presidency: Indonesia's Decade of Authoritarian Revival*. Disunting oleh Sana Jaffrey dan Eve Warburton. Singapura: ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2025.

Jones, Sidney. "The Politicization of Security under Jokowi." *Indonesia Update 2024* (Canberra: ANU Indonesia Project, September 13-14 2024). Diakses pada 21 Oktober 2025.

[https://static1.squarespace.com/static/6073e7bd03c5b9274751137e/t/66ea42de86bc963f411a060e/1726628577465/19\\_Sidney+Jones\\_CAP+Jones-Wide.pdf](https://static1.squarespace.com/static/6073e7bd03c5b9274751137e/t/66ea42de86bc963f411a060e/1726628577465/19_Sidney+Jones_CAP+Jones-Wide.pdf)

Jubi. "46,286 troops sent to Papua from 2019 to 2021: ELSHAM." *Jubi.id*. 24 Juni 2022. <https://en.jubi.id/46286-troops-sent-to-papua-from-2019-to-2021-elsham/>

Kadir, Sahril. "9 Daerah di Papua Masuk Wilayah Perang, Ada Dimana Saja?." *Manadoku*. 20 April 2025. <https://manado.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2369256721/9-daerah-di-papua-masuk-wilayah-perang-ada-dimana-saja?page=3>

Kandiyas, Sulthon Sulung. "RUU BUMN dibahas Kilat hanya 4 Hari, Ini poin-poin pentingnya." *Bisnis Indonesia*. 26 September 2025. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250926/9/1914932/ruu-bumn-dibahas-kilat-hanya-4-hari-ini-poin-poin-pentingnya>

Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokasi. "Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan, Indonesia Sekarang Miliki 38 Provinsi." *Menpan*. 9 Desember 2022. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/provinsi-papua-barat-daya-diresmikan-indonesia-sekarang-miliki-38-provinsi>

Koalisi Masyarakat Sipil. "Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi KUHAP Meminta DPR Kembali Membuka Pembahasan RRUHAP secara Substansi, tidak Tergesa-gesa dan Melakukan Partisipasi Publik yang 'Bermakna.'" *YLBHI*. 22 Juli 2025. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/koalisi-masyarakat-sipil-untuk-reformasi-kuhap-meminta-dpr-kembali-membuka-pembahasan-rruhap-secara-substansi-tidak-tergesa-gesa-dan-melakukan-partisipasi-publik-yang-bermakna/>

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). *Laporan Hari Bhayangkara 2024: "Reformasi Polisi Tinggal Ilusi."* Jakarta: KontraS, 1 Juli 2024. <https://kontras.org/laporan/laporan-hari-bhayangkara-2024-reformasi-polisi-tinggal-ilusi>

KontraS. "Penerbitan Surpres RUU Polri: Bentuk Arogansi Presiden Jokowi yang Menelantarkan Kritik Publik dan Mengukuhkan Praktik Legislasi Otoriter." *Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)*. 10 Juli 2024. <https://kontras.org/artikel/penerbitan-surpres-ruu-polri-bentuk-arogansi-presiden-jokowi-yang-menelantarkan-kritik-publik-dan-mengukuhkan-praktik-legislasi-otoriter>

KontraS. "Rilis Hari Bhayangkara 2025: Kekerasan yang Menjulung di Tengah Penegakan Hukum yang Timpang." *Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)*. 30 Juni 2025, <https://kontras.org/artikel/rilis-hari-bhayangkara-2025-kekerasan-yang-menjulung-di-tengah-penegakan-hukum-yang-timpang>

Kurawal Foundation. "Tanpa Pembentukan TGPf Kasus Kerusakan Agustus 2025, Keadilan Tak Akan Bisa Ditegakkan." *Kurawal Foundation*. 29 September 2025. <https://www.kurawalfoundation.org/senandika/tanpa-tgpf-kasus-agustus-2025-keadilan-tak-bisa-ditegakkan>

Larasati, Diva Suukyi. "Edisi 10 Tahun Jokowi: Geng Solo dan Pengaruh Presiden di Polri." *TEMPO*. 29 Juli 2024. <https://www.tempo.co/hukum/edisi-10-tahun-jokowi-geng-solo-dan-pengaruh-presiden-di-polri-35652>

Law-Justice. "Presiden Prabowo Didesak Sahkan RUU Masyarakat Adat di 100 Hari Kerja." *Law-Justice.co*. 21 Oktober 2024. <https://www.law-justice.co/artikel/176123/presiden-prabowo-didesak-sahkan-ruu-masyarakat-adat-di-100-hari-kerja/>

Litha, Yoanes. "Indeks Keselamatan Meningkat, Tapi Banyak Jurnalis Masih Cemas." *VOA Indonesia*. 24 Februari 2025. <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-keselamatan-meningkat-tapi-banyak-jurnalis-masih-cemas/7985947.html>

Mardika, Rini "Ironi RUU Masyarakat Adat dan RUU PRT: Puluhan Tahun Digantung DPR." *Merdika*. 24 Maret 2025. <https://merdika.id/ironi-ruu-masyarakat-adat-dan-ruu-pprt-puluhan-tahun-digantung-dpr/>

Merdeka. "Kasak kusak isu makar yang menjerat aktivis dan pensiunan jenderal." *merdeka.com*. 3 Desember 2016. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasak-kusak-isu-makar-yang-menjerat-aktivis-dan-pensiunan-jenderal.html>

Mustika, Pradipta Pandu. "Pengakuan terhadap Wilayah dan Hak Masyarakat Adat Simbol Perwujudan Asta Cita." *Kompas.id*. 10 Agustus 2025. <https://www.kompas.id/artikel/pengakuan-terhadap-wilayah-dan-hak-masyarakat-adat-simbol-perwujudan-asta-cita>

Ni'am, Syakirun dan Jessi Carina. "Kronologi Kasus Tom Lembong: Disidik Menjelang Pilpres, Dibebaskan Prabowo." *Kompas.com*. 1 Agustus 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/08130231/kronologi-kasus-tom-lembong-disidik-menjelang-pilpres-dibebaskan-prabowo?page=all>

Nugraha, Dimas Waraditya. "Dalam Lima Tahun, Polri Belanja Rp 2.6 Triliun untuk Alat Pengendali Massa." *Kompas.id*. 29 Agustus 2025. <https://www.kompas.id/artikel/dalam-lima-tahun-polri-belanja-rp-26-triliun-untuk-alat-pengendali-massa>

Nugraha, Muhammad Raihan. "Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi dalam Pembentukan UU." *HukumOnline.com*. 19 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu-lt5falla34d604b/>

Nugroho, Novali Panji. "Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua." *TEMPO*. 3 Oktober 2024. <https://www.tempo.co/politik/baru-dibentuk-ini-daftar-5-yonif-penyangga-daerah-rawan-di-papua-3161>

Opita, Elvariza. "Gubernur Lukas Enember Kritik Trans Papua: Kami Butuh Kehidupan, Bukan Pembangunan." *wowkeren.com*. 23 Agustus 2019. <https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00269758.html>

Pebrianto, Fajar. "Geng Solo di Trunojoyo." *TEMPO*. 28 Juli 2024. <https://www.tempo.co/arsip/polisi-di-bawah-jokowi-24797>

Power, Thomas, dan Eve Warburton. "The decline of Indonesian democracy." *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* Disunting oleh Thomas Power and Eve Warburton. Singapura: ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2020.

Pramono, Stefanus. "Orde Baru KUHP." *TEMPO*. 13 Desember 2022. <http://tempo.co/newsletter/orde-baru-kuhp-240118>

Priyasmono, Muhammad Radityo. "Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?" *Liputan 6*. 7 November 2024. <https://www.liputan6.com/news/read/5774208/prabowo-tinjau-ulang-seluruh-undang-undang-hingga-perpres-apa-prioritasnya?page=2>

Purwanti, Ani dan Alexander Seran. "Diskursus Publik dan Narasi Media Sosial: Perspektif Otto Kirchheimer tentang Politisasi Hukum." *Journal of Mandalilka Literature*, 6. No. 1, 2024. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/download/3978/3096/>

Puspapertiwi, Erwina Rachmi dan Ahmad Naufal Dzulfaroh. "Hingga April 2025, Sudah Ada 7 Hakim yang Terjerat Kasus Suap." *Kompas.com*. 15 April 2025. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/15/191500565/hingga-april-2025-sudah-ada-7-hakim-yang-terjerat-kasus-suap>

Putri, Bugivia Maharani Setiadji. "Revisi KUHP: Kuasa Polisi makin besar, warga makin terpojok?" *The Conversation*. 28 Juli 2025. <https://theconversation.com/revisi-kuhp-kuasa-polisi-makin-besar-warga-makin-terpojok-261882>

Putri, Zunita. "Jejak Hasto di Kasus Harun Masiku: Jadi Tersangkat, Diadili, Lalu Dapat Amnesti." *Detiknews*. 1 Agustus 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8039946/jejak-hasto-di-kasus-harun-masiku-jadi-tersangkat-diadili-lalu-dapat-amnesti>

Santika, Erlina F.. "Survei LSI: Kepuasan Masyarakat terhadap Demokrasi Menurun." *Katadata.co.id*. 19 Februari 2024. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/02/19/survei-lsi-kepuasan-masyarakat-terhadap-demokrasi-menurun>

Saptohutomo, Aryo Putranto. "Isi Lengkap Pidato Perdana Presiden Prabowo Subianto Usai Pelantikan." *Kompas.com*. 20 Oktober 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/20/13344741/isi-lengkap-pidato-perdana-presiden-prabowo-subianto-usai-pelantikan?page=2>

Saputra, Eka Yudha. "Indikator Bantah Merilis Survei yang Menunjukkan Tingkat Kepuasan terhadap Prabowo Anjlok." *TEMPO*. 27 September 2025. <https://www.tempo.co/politik/indikator-bantah-merilis-survei-yang-menunjukkan-tingkat-kepuasan-terhadap-prabowo-anjlok-2073955>

Sari, Amelia Rahima. "ICW Catat 29 Hakim Jadi Tersangka Korupsi, Nilai Suap Capai Rp 107,9 M." *TEMPO*. 17 April 2025, <https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-29-hakim-jadi-tersangka-korupsi-nilai-suap-capai-rp-107-9-m-1232399>

Sari, Haryanti Puspa, dan Nawir Arsyad Akbar. "Prabowo Akan Bentuk Komisi Reformasi Polri, Kaji Ulang Tugas dan Wewenang Polisi." *Kompas.com*. 17 September 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/12063481/prabowo-akan-bentuk-komisi-reformasi-polri-kaji-ulang-tugas-dan-wewenang>

Sari, Putri Dinda Permata. "Komisi XIII DPR Kebut RUU Perlindungan PRT: Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo." *Akurat*. 30 Oktober 2024. <https://www.akurat.co/nasional/1305256057/komisi-xiii-dpr-kebut-ruu-perlindungan-prt-sejalan-dengan-asta-cita-presiden-prabowo>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Mendagri Resmikan Tiga Provinsi Baru di Papua." *Setkab.go.id*. 11 November 2022. <https://setkab.go.id/mendagri-resmikan-tiga-provinsi-baru-di-papua/>

Setuningsih, Novianti dan Tria Sutrisna. "Daftar 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025, RUU Perampasan Aset hingga RUU Polri." *Kompas.com*. 23 September 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/23/15253421/daftar-52-ruu-prolegnas-prioritas-2025-ruu-perampasan-aset-hingga-ruu-polri>

Singgih, Viriya. "'Presidential Club' ala Prabowo dikhawatirkan jadi 'klub elite para sultan' - 'Kuncinya ada di Megawati'." *BBC News Indonesia*. 7 Mei 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckv7plzwqg7o>

Siregar, Sarah Nuraini, Riaty Raffiudin, dan Firman Noor. "Democratic regression in Indonesia: Police and law-capacity democracy in Jokowi's administration (2014-2020)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 26. Issue 2. November 2022. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/72129/pdf>

Supriatma, Made. "Task Force Battalion Under Operation Command (BKO) in Papua 2024." Unpublished report, 2024.

Tapol. "Militerisme yang Mengakar, Pendekatan "Kesejahteraan", dan Politik Pengecualian di West Papua." *Tapol*. 8 Desember 2020. <https://tapol.org/id/publications/militerisme-yang-mengakar-pendekatan-kesejahteraan-dan-politik-pengecualian-di-west>

Tarung News. "Presiden Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru Berikut Inilah Daptarnya." *TarungNews.com*. 10 Agustus 2025. <https://www.tarungnews.com/berita-foto/18105/presiden-prabowo-resmikan-6-kodam-baru-berikut-inilah-daptarnya.html>

The Gecko Project. "Pemain Baru Mulai Babat Hutan Dalam Proyek Perkebunan Sawit Raksasa di Papua." *thegeckoproject.org*. 24 April 2020. <https://thegeckoproject.org/id/articles/new-player-starts-clearing-rainforest-in-world-s-biggest-oil-palm-project/>

Thea DA, Ady. "3 Peran Penting Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi." *HukumOnline.com*. 30 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-peran-penting-partisipasi-publik-dalam-proses-legislasi-lt66a8509c12e8d/>

Thea DA, Ady. "Brutalitas Kepolisian Terus Berulang, Koalisi Minta Kapolri Listyo Sigit Dicapot." *HukumOnline.com*. 29 Agustus 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/brutalitas-kepolisian-terus-berulang--koalisi-minta-kapolri-listyo-sigit-dicapot-lt68b1652b40283/>

Thea DA, Ady. "Mantan Hakim Konstitusi: Pencopotan Aswato Serangan Terhadap Kemandirian MK." *HukumOnline.com*. 9 November 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi--pencopotan-aswato-serangan-terhadap-kemandirian-mk-lt636b395c8bb1a/>

Tim Suara Ternate. "Meski Dinyatakan Bersalah, Hakim Vonis Bebas 2 Polisi Penembak Laskar FPI di KM 50, Kok Bisa?" *SuaraTernate.com*. 18 Maret 2022. <https://ternate.pikiran-rakyat.com/politik-hukum/amp/pr-2064011104/meski-dinyatakan-bersalah-hakim-vonis-bebas-2-polisi-penembak-laskar-fpi-di-km-50-kok-bisa?page=all>

Trikarinaputri, Ervana. "Pakar Hukum Soroti 4 UU Instan di Era Jokowi, Dibuak Tergesa-gesa dan Abaikan Partisipasi Publik." *Tempo*. 3 Oktober 2024. <https://www.tempo.co/arsip/pakar-hukum-soroti-4-uu-instan-di-era-jokowi-dibuak-tergesa-gesa-dan-abaikan-partisipasi-publik--3109>

Utama, Wildan Sena. "Politics and Governance in Indonesia. The Police in the Era of Reformasi, written by Muradi." *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 171. No. 4. 2015: 593–595. <https://doi.org/10.1163/22134379-17104017>

Velarosdela, Rindi Nuris, dan Ambaranie Nadia Kemala Movanita. "Kronologi Penangkapan Aktivis Rавio Patra Versi Polisi dan Klarifikasi Kedubes Belanda." *Kompas.com*. 28 April 2020. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/28/07332961/kronologi-penangkapan-aktivis-ravio-patra-versi-polisi-dan-klarifikasi>

*Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran 2024: Bersama Indonesia Maju, 2024.*

Wahyuni, Willa. "Peran Krusial Hukum Adat dalam RPJPN dan Asta Cita." *HukumOnline.com*. 18 Februari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-krusial-hukum-adat-dalam-rpjpn-dan-asta-cita-lt67b46d4d8d1e7/?page=2>

Wahyuni, Willa. "Melihat Kembali Sederet Pasal Kontroversial KUHP Baru." *HukumOnline.com*. 20 Januari 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-sederet-pasal-kontroversial-kuhp-baru-lt63ca672b7dc8d/>

Wardah, Fathjyah "Survei Indikator Politik Indonesia: 85,3% Yakin Prabowo Mampu Memimpin Indonesia." *VOA Indonesia*. 29 Oktober 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/survei-indikator-politik-indonesia-85-3-yakin-prabowo-mampu-memimpin-indonesia/7842381.html>

Wicaksono, Rizaldi Ageng, Meila Nurul Fajriah, dan Bugivia Maharani Setiadji Putri. *Buku Saku Merindukan Hoegeng, Mengapa Polisi Perlu Direformasi?*. Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, 2024.

Yewen, Roberthus dan Aloysius Gonsaga AE. "75 Orang Jadi Korban Kekerasan di Papua Sejak Januari hingga Juni 2025." *Kompas.com*. 15 Juni 2025. <https://regional.kompas.com/read/2025/06/15/222059878/75-orang-jadi-korban-kekerasan-di-papua-sejak-januari-hingga-juni-2025>

YLBHI. "Atgas Operasi Habema Bentuk Kogabwilhan III Diduga Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat di Kabupaten Intan Jaya." *Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)*. 29 Mei 2025. <https://ylbhi.or.id/papua/atgas-operasi-habema-bentukan-kogabwilhan-iii-diduga-melakukan-tindak-pidana-pelanggaran-ham-berat-di-kabupaten-intan-jaya/>

Zamzami, Fitriyani. "Sepuluh Tahun di Papua, dari Paniai Hingga Pemekaran." *Republika*. 20 Oktober 2024. <https://news.republika.co.id/berita/slmuv2393/sepuluh-tahun-di-papua-dari-paniai-hingga-pemekaran?>

